

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN NGANJUK MENURUT PENGELUARAN 2016-2020



**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN NGANJUK
MENURUT PENGELUARAN
2016-2020**



PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN NGANJUK MENURUT PENGELUARAN 2016-2020

ISBN : 978-623-7091-31-8
Nomor Publikasi : 35180.2103
Katalog : 9302004.3518
Ukuran Buku : 21 x 29,7 cm
Jumlah Halaman : x + 73 Halaman

Naskah : Seksi Neraca Wilayah Dan Analisis Statistik

Penyunting : Seksi Neraca Wilayah Dan Analisis Statistik

Desain cover : BPS Kabupaten Nganjuk

Diterbitkan Oleh : ©BPS Kabupaten Nganjuk

Dicetak Oleh : CV. Azka Putra Pratama

**Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan,
dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan
komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik**

KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar (*velocity of money*), pendalaman sektor keuangan (*financial deepening*), penetapan pajak, kajian ekspor dan impor dan sebagainya.

Publikasi ini merupakan publikasi ke tiga, secara khusus membahas PDRB menurut pengeluaran/permintaan akhir, yang dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori),serta Ekspor dan Impor. Data PDRB dalam publikasi ini serta publikasi yang akan datang menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep *System of National Accounts 2008* seperti yang direkomendasikan oleh *United Nations*.

Kepada instansi pemerintah dan lembaga/perusahaan swasta yang telah memberikan dukungan data diucapkan terima kasih. Semoga kerjasama yang telah terjalin dapat terus berlanjut serta dapat ditingkatkan di masa-masa mendatang.

Akhirnya, semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Nganjuk, April 2021

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
Kabupaten Nganjuk,



Ir. SATYA HARI SOEDIBJO, M.M.
NIP. 196603311991031001

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Grafik	ix
Daftar Lampiran	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	3
1.2. Kegunaan Statistik PDRB.....	6
BAB II METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA	11
2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga	13
2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT	15
2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah	16
2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	19
2.5 Perubahan Inventori	21
2.6 Ekspordan Impor Barang serta Jasa	24
BAB III TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN NGANJUK BERDASARKAN PDRB PENGELUARAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2016-2020.....	25
3.1 Perkembangan PDRB Pengeluaran	27
3.2 Perkembangan Komponen PDRB Pengeluaran.....	34
3.2.1 Konsumsi Akhir Rumah Tangga	34
3.2.2 Konsumsi Akhir LNPRT	38
3.2.3 Konsumsi Akhir Pemerintah	39
3.2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	42
3.2.5 Perubahan Inventori	43

3.2.6	Ekspor Barang dan Jasa.....	44
3.2.7	Perkembangan Impor Barang dan Jasa.....	45
BAB IV	PERKEMBANGAN AGREGAT PRDB MENURUT PENGELUARAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2016-2020.....	49
4.1	PDRB (Nominal)	51
4.2	Proporsi Pengeluaran Konsumsi Akhir Terhadap PDRB.....	52
4.2.1	Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	53
4.2.2	Proporsi Konsumsi Akhir terhadap PDRB	54
4.2.3	Perbandingan Ekspor terhadap PMTB	54
4.2.4	Perbandingan PDRB terhadap Impor	55
4.2.5	Keseimbangan Total Penyediaan dan Total Permintaan	55
4.2.6	Neraca Perdagangan (<i>Trade Balance</i>)	56
4.3	<i>Incremental Capital Output Ratio</i> (ICOR)	58
	PENUTUP	59
	LAMPIRAN	63
	DAFTAR PUSTAKA	71

DAFTAR TABEL

Tabel 1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Nganjuk Tahun 2015-2020.....	28
Tabel 2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Nganjuk Tahun 2015-2020.....	29
Tabel 3	Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran, Kabupaten Nganjuk Tahun 2015-2020.....	31
Tabel 4	Pertumbuhan Menurut Pengeluaran, Kabupaten Nganjuk Tahun 2015-2020.....	33
Tabel 5	Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Nganjuk, Tahun 2015-2020.....	34
Tabel 6	Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Nganjuk, Tahun 2015-2020.....	35
Tabel 7	Struktur Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Nganjuk, Tahun 2015-2020.....	37
Tabel 8	Pertumbuhan Riil Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Nganjuk, Tahun 2015-2020.....	37
Tabel 9	Perubahan Indeks Harga Implisit Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Nganjuk, Tahun 2015-2020.....	38
Tabel 10	Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRT Kabupaten Nganjuk, Tahun 2015-2020.....	39
Tabel 11	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Nganjuk, Tahun 2015-2020.....	40
Tabel 12	Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Nganjuk, Tahun 2015-2020.....	43
Tabel 13	Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Nganjuk, Tahun 2015-2020.....	44
Tabel 14	Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Nganjuk, Tahun 2015-2020.....	45
Tabel 15	Perkembangan Impor Barang dan Jasa Kabupaten Nganjuk, Tahun 2015-2020.....	46

Tabel 16	Produk Domestik Regional Brutodan PDRB Perkapita Kabupaten Nganjuk, Tahun 2015-2020.....	51
Tabel 17	Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor Tahun 2015 – 2020	52
Tabel 18	Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB Tahun 2015-2020.....	53
Tabel 19	Proporsi Total Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Nganjuk, Tahun 2015-2020.....	54
Tabel 20	Rasio Ekspor terhadap PMTB (ADHB) Tahun 2015-2020.....	54
Tabel 21	Rasio PDRB terhadap Impor Kabupaten Nganjuk Tahun 2015-2020.....	55
Tabel 22	SisiKeseimbanganPenyediaanPermintaanKabupatenNganjuk, Tahun 2015-2020.....	56
Tabel 23	Neraca Perdagangan Barang dan Jasa, Kabupaten Nganjuk Tahun 2015-2020.....	57
Tabel 24	<i>Incremental Capital Output Ratio</i> , Kabupaten Nganjuk, Tahun 2015-2020.....	58

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Nganjuk 2015-2020.....	28
Grafik 2	PDRB atas dasar harga Konstan Menurut Pengeluaran, Kabupaten Nganjuk 2015-2020.....	29
Grafik 3	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran, Kabupaten Nganjuk 2015-2020 (Persen).....	30
Grafik 4	Perbandingan PDRB atas dasar harga Berlaku dan atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Nganjuk 2015-2020.....	30
Grafik 5	Distribusi PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Nganjuk 2015-2020.....	32
Grafik 6	Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran, Kabupaten Nganjuk 2015-2020 (Persen)	33

DAFTAR LAMPIRAN

Lamp 1	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Nganjuk Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran 2015-2020	65
Lamp 2	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Nganjuk Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran 2015-2020	66
Lamp 3	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Nganjuk Menurut Pengeluaran 2015-2020.....	67
Lamp 4	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Nganjuk Menurut Pengeluaran 2015-2020.....	68
Lamp 5	Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Kabupaten Nganjuk Menurut Pengeluaran, 2015-2020.....	69
Lamp 6	Perubahan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Kabupaten Nganjuk Menurut Pengeluaran 2015-2020.....	70

BAB 1
PENDAHULUAN

<https://inganjukkab.bps.go.id>

1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto menurut pengeluaran (PDRB Pengeluaran) merupakan salah satu bentuk tampilan data ekonomi suatu wilayah, di samping bentuk tampilan lain seperti PDRB menurut lapangan usaha, Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi, dan Neraca Arus Dana. Di dalam sistem kerangka kerja (*frame work*) data ekonomi suatu wilayah, PDRB Pengeluaran merupakan ukuran dasar (*basic measure*) yang menggambarkan penggunaan atas barang dan jasa (*product*) yang dihasilkan melalui aktivitas produksi. Dalam konteks ini, PDRB Pengeluaran itu menggambarkan hasil “akhir” dari proses produksi yang berlangsung dalam batas-batas teritori suatu wilayah. Berbagai jenis barang dan jasa akhir tersebut akan digunakan untuk memenuhi permintaan akhir oleh pelaku ekonomi domestik maupun pelaku ekonomi dari luar wilayah bahkan dari luar negeri. Beberapa agregat penting dapat diturunkan dari PDRB Pengeluaran ini seperti variabel Pengeluaran Konsumsi Akhir, pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik, serta ekspor dan impor.

Penghitungan PDRB melalui pendekatan pengeluaran (*expenditure*) tidak terlepas dari penghitungan PDRB melalui pendekatan lapangan usaha (*production*). Sungguhpun demikian, PDRB Pengeluaran diestimasi secara independen dengan menggunakan data dasar yang relatif berbeda. PDRB Produksi menggambarkan aktivitas produksi, serta pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang terlibat (balas jasa faktor produksi)¹. Sedangkan PDRB Pengeluaran menggambarkan aktivitas pengeluaran yang dilakukan para pelaku ekonomi untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi tersebut. Melalui PDRB Pengeluaran juga dapat dilihat keterkaitannya dengan penyediaan barang dan jasa yang berasal dari domestik maupun dari impor. Melalui hubungan ini terlihat titik keseimbangan makro antara sisi penyediaan (*supply side*) dan sisi permintaan (*demand side*) barang dan jasa.

Secara konsep² penghitungan PDRB dari sisi yang berbeda di atas dimaksudkan untuk: i) memastikan konsistensi dan kelengkapan di dalam membuat estimasi; ii) memberi manfaat lebih di dalam melakukan analisis; dan iii) mengontrol kelayakan hasil estimasi. Secara teoritis, kedua pendekatan tersebut akan menghasilkan nilai yang sama besar (*equivalent*). Namun karena pendekatan estimasi dan metoda pengukuran yang digunakan berbeda, maka akan muncul selisih statistik (*statistical discrepancy*).

Dengan demikian PDRB Pengeluaran menjelaskan besarnya nilai barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan dalam wilayah domestik, yang digunakan sebagai konsumsi “akhir” oleh masyarakat. Secara spesifik, yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan barang dan jasa yang tidak dimasukkan untuk diproses lebih lanjut (dikonsumsi habis). Penggunaan produk akhir tersebut

¹Termasuk di dalamnya penyusutan dan pajak tidak langsung “neto” (pajak tidak langsung dikurangi subsidi)

²Handbook of National Accounting. Accounting for Production: Sources and Methods (Series F no 30 United Nations)

diwujudkan dalam bentuk “permintaan akhir”. Permintaan akhir yang dimaksud terdiri dari komponen-komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori (PI), serta komponen Ekspor barang dan jasa.

Dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan akhir masyarakat tersebut, tidak terlepas dari ketergantungan pada produk yang berasal dari luar wilayah atau luar negeri (impor). Berbagai barang dan jasa yang menjadi konsumsi akhir masyarakat di dalamnya akan terkandung produk impor. Sehingga dalam mengukur besarnya nilai tambah domestik (PDRB), komponen impor barang dan jasa harus dikeluarkan atau dikurangkan dari penghitungan konsumsi atau permintaan akhir. Tingginya permintaan tidak selalu diimbangi oleh penyediaan domestik, sehingga kondisi ini menjadi peluang bagi masuknya produk impor. Data empiris menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu, perdagangan produk impor terus berkembang baik secara kuantitas, nilai, maupun ragamnya.

Secara konsep, PDRB Produksi (Y) sama besar dengan PDRB Pengeluaran (E), namun dalam kenyataannya tidaklah demikian. Selain berbeda dalam struktur atau komposisi, pendekatan pengukuran antar keduanya juga berbeda. Dalam penyajian data PDRB, perbedaan ini diletakkan pada sisi PDRB Pengeluaran. Unsur yang menyebabkan perbedaan tersebut antara lain adalah konsep dan basis pengukuran, metoda dan cakupan pengukuran, serta data dasar yang digunakan untuk estimasi. Melalui penjelasan ini para pengguna data PDRB tidak mempermasalahkan adanya perbedaan (*statistical discrepancy*) tersebut.

Penyusunan data **PDRB Pengeluaran** juga dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana “pendapatan” (Y) yang tercipta melalui proses produksi menjadi sumber pendapatan masyarakat³, yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir.

Dari sudut pandang lain, PDRB Pengeluaran juga menjelaskan penggunaan dari sebagian besar produk domestik bruto untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir, atau dengan istilah yang berbeda disebut sebagai “**output akhir (final output)**”. Mengkaitkan antara pendapatan dan pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa dari produk domestik maupun impor (termasuk untuk diekspor) merupakan bentuk analisis yang sederhana dari data PDRB. Keharusan memiliki jumlah yang sama pada kedua model pendekatan PDRB tersebut, secara simultan dapat ditunjukkan melalui model atau persamaan *Keynesian* sbb :

3. - Yang dimaksud adalah rumah tangga, pemerintah, lembaga non profit yang melayani rumah tangga serta sektor produksi (produsen) di wilayah domestik
- Disebut sebagai pendekatan “riil”
- Siklus ekonomi secara umum yang menjelaskan tentang hubungan antara balas jasa faktor produksi (pendapatan) dengan pengeluaran atas penggunaan berbagai produk barang dan jasa oleh faktor produksi tersebut

$$Y = C + GFCF + \Delta \text{ Inventori} + X - M$$

Y (<i>Income</i>)	= PDRB Produksi
C (<i>Consumption</i>)	= Konsumsi akhir
GFCF (<i>Gross Fixed Capital Formation</i>)	= Pembentukan Modal Tetap Bruto
Δ Inventori	= Perubahan Inventori
X	= Ekspor
M	= Impor

Persamaan diatas menunjukkan pendapatan atau nilai tambah bruto dari hasil penghitungan PDRB Produksi akan “identik” dengan PDRB Pengeluaran. Jika Y adalah pendapatan, C adalah konsumsi akhir, dan GFCF serta Δ Inventori merupakan bentuk investasi fisik, maka selisih antara ekspor dengan impor menggambarkan surplus atau defisit dari aktivitas perdagangan barang dan jasa antar wilayah, baik dengan wilayah lain ataupun dengan luar negeri.

Melalui pendekatan ini dapat diketahui perilaku masyarakat dalam menggunakan pendapatan, apakah hanya untuk tujuan konsumsi (akhir) atau juga untuk tujuan investasi (fisik). Selain itu juga dapat diketahui besarnya ketergantungan ekonomi wilayah (domestik) terhadap luar negeri dalam bentuk perdagangan internasional (*external transaction*). Selisih antara ekspor dan impor juga disebut sebagai “ekspor neto” .

Sebagaimana PDRB Produksi, dari PDRB Pengeluaran juga dapat diturunkan berbagai data agregat tentang perekonomian wilayah seperti nilai nominal, struktur atau distribusi pengeluaran konsumsi akhir, pertumbuhan “riil”, serta indeks harga implisit. Data yang dimaksud tersedia baik untuk masing-masing komponen PDRB Pengeluaran maupun untuk total perekonomian.

Mengapa Tahun Dasar PDRB Perlu Diubah ?

Satu bentuk implementasi dari *System of National Accounts*(SNA) adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB/PDRB. Di Indonesia kegiatan perubahan tahun dasar dari tahun 2000 ke 2010 dilakukan bersamaan dengan upaya mengimplementasi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam buku panduan SNA2008. Kegiatan ini diawali dengan menyusun kerangka kerja dalam bentuk *Supply and Use Tables* (SUT) Indonesia untuk tahun data 2010. Dari kerangka SUT tersebut diperoleh nilai estimasi PDB dan komponen-komponennya. Selanjutnya nilai PDB maupun komponennya ini dijadikan sebagai acuan (*benchmark*) ketika BPS Provinsi maupun BPS Kabupaten/Kota menyusun PDRB-nya. Untuk itu, guna menjaga konsistensi dengan hasil penghitungan PDB, maka perubahan tahun dasar PDRB dilakukan secara simultan dengan perubahan tahun dasar PDB.

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada kondisi perekonomian global maupun lokal, yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional, serta semakin meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan beberapa contoh perubahan yang perlu diantisipasi dalam mekanisme pencatatan data statistik nasional.

Apa yang Dimaksud dengan SNA 2008 ?

SNA2008 merupakan rekomendasi internasional tentang tata cara pengukuran aktivitas ekonomi, yang telah sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, cakupan, dan klasifikasi, serta aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur indikator ekonomi makro (*account*) seperti PDB/PDRB.

SNA dirancang guna menyediakan informasi tentang aktivitas yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi, utamanya aktivitas produksi, konsumsi, dan aktivitas akumulasi aset fisik. SNA dapat dimanfaatkan antara lain untuk kepentingan analisis, perencanaan dan penetapan kebijakan ekonomi. Melalui kerangka SNA, fenomena suatu perekonomian wilayah dapat dijelaskan dan dipahami dengan lebih baik.

Apa Manfaat Perubahan Tahun Dasar ?

Manfaat perubahan tahun dasar PDRB diantaranya adalah:

- a. Menginformasikan kondisi ekonomi terkini, seperti terjadinya perubahan struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- b. Meningkatkan kualitas PDRB;
- c. Menjadikan PDRB dapat diperbandingkan secara nasional.

Apa Implikasi Perubahan Tahun Dasar ?

Perubahan tahun dasar PDRB antara lain berdampak pada:

- a. Meningkatkan nilai PDRB, yang pada gilirannya berpengaruh pada perubahan kelompok pendapatan (dari wilayah berpendapatan rendah menjadi menengah atau tinggi), serta pergeseran struktur ekonomi;
- b. Perubahan besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan tabungan, neraca perdagangan, serta struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- c. Perubahan input data untuk keperluan *modeling* dan *forecasting*.

Mengapa Tahun 2010 sebagai tahun dasar ?

Terpilihnya tahun 2010 sebagai tahun dasar didasarkan atas beberapa alasan sbb:

- Perekonomian Indonesia pada tahun 2010 relatif stabil;
- Terjadinya perubahan struktur ekonomi Indonesia selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, terutama di bidang informasi, teknologi dan transportasi. Perubahan ini berpengaruh pada pola distribusi dan munculnya beberapa produk baru;
- Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar, yang harus dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun⁴;
- Adanya pembaharuan konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, sumber data, dan metodologi penghitungan sesuai rekomendasi SNA2008;
- Tersedianya data dasar untuk meningkatkan kualitas PDRB seperti hasil Sensus Penduduk 2010 dan Indeks Harga Produsen (*Producers Price Index*);
- Tersedianya kerangka SUT Indonesia tahun 2010, yang menunjukkan keseimbangan antara produksi, konsumsi serta pendapatan yang tercipta dari aktivitas tersebut.

⁴SNA1993, para 16.76: "constant price series should not be allowed to run for more than five, or at the most, ten years without rebasing"

Implementasi SNA 2008 dalam PDRB tahun dasar 2010

Terdapat 118 revisi di SNA 2008 dari SNA sebelumnya, dan 44 diantaranya merupakan revisi yang utama. Beberapa revisi yang diadopsi dalam penghitungan PDB/PDRB tahun dasar 2010 antara lain adalah:

- Konsep dan Cakupan
 - a. Sumber daya hayati (*cultivated biological resources/CBR*). *CBR* merupakan nilai aset alam hasil budidaya manusia, yang diperlakukan sebagai bagian dari output pertanian dan PMTB. Contoh nilai tegakan padi, kelapa sawit dan karet yang belum dipanen, serta nilai sapi perah yang belum menghasilkan.
 - b. Sistem persenjataan (*military weapon systems/MWS*). *MWS* merupakan nilai pengeluaran pemerintah untuk pengadaan alatpertahanan dan keamanan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri peralatan militer dan PMTB seperti pesawat tempur, kendaraan lapis baja, dan peluru kendali.
 - c. Penelitian dan pengembangan (*research and development/RnD*). *RnD* merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas penelitian dan pengembangan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB seperti *RnD* tentang varietas padi, produk otomotif, dan riset pemasaran.
 - d. Eksplorasi dan evaluasi mineral (*mineral exploration and evaluation/MEE*). *MEE* merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah berhasil atau tidak menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.
 - e. Bank Sentral (*Central Bank/CB*).Aktivitas Bank Indonesia yang terkait dengan penyediaan jasa kebijakan moneter dan pengawasan dipisahkan dari jasa intermediasi keuangan. Aktivitas tersebut digabungkan dengan aktivitas penyediaan jasa regulasi yang dihasilkan pemerintahan.
 - f. Komputer software (*computer software and databases/CSD*). *CSD* merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunan *databases*, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
 - g. Produk kekayaan intelektual (*entertainment, literary or artistic originals/ELA*). *ELA* merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunannya, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
 - h. Pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah kegiatan tersebut berhasil ataupun tidak berhasil menemukan

cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.

- Metodologi

Output jasa intermediasi keuangan. Output industri ini diestimasi dengan metoda FISIM (*Financial intermediation services indirectly measured / FISIM*). FISIM dihitung berdasarkan tingkat suku bunga simpanan (*deposits*), bunga pinjaman (*loans*), dan suku bunga referensi (*reference*). Metoda ini menggantikan metoda *Imputed Bank Services Charge (IBSC)*.

- Valuasi

Nilai tambah bruto lapangan usaha dinilai dengan harga dasar (*Basic Price*). Harga dasar merupakan harga keekonomian suatu barang atau jasa pada tingkat produsen, sebelum ada intervensi pemerintah dalam bentuk pajak dan subsidi atas produk.

- Klasifikasi

Klasifikasi yang digunakan adalah Internasional Standard Industrial Classification (ISIC rev.4) dan Central Product Classification (CPC rev.2). BPS mengadopsi kedua jenis klasifikasi tersebut menjadi KBLI 2009 dan KBKI 2010.

Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010

PDRB Tahun Dasar 2000	PDRB Tahun Dasar 2010
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
4. Perubahan Inventori	4. Pembentukan Modal Tetap Bruto
5. Ekspor	5. Perubahan Inventori
6. Impor	6. Ekspor
	7. Impor

BAB 2

METODA ESTIMASI DAN SUMBER DATA

<https://nganjukkab.bps.go.id>

i. Pendahuluan

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan komponen konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran⁵. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen serta penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lainnya.

ii. Konsep dan Definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumahtangga (PK-RT) merupakan pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama utamanya kelompok makanan dan perumahan.

iii. Cakupan

PK-RT mencakup pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumahtangga residen, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis barang dan jasa tersebut diklasifikasikan menurut *Classifications of Individual Consumption by Purpose (COICOP)*, sbb:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alat kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumah tangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

⁵ Untuk Kabupaten/Kota yang mempunyai hasil tambang/industri/perkebunan dan nilai eksportnya sangat tinggi, umumnya nilai konsumsi rumah tangganya relatif lebih rendah

Namun dalam publikasi ini, PK-RT hanya diklasifikasi ke dalam 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Perelengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

iv. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi komponen PK-RT bersumber dari :

- Survei Sosial Ekonomi Nasional/Daerah (Susenas/Suseda), BPS
- Survei Khusus Konsumsi Rumah tangga Triwulanan (SKKRT), BPS
- Sensus Penduduk 2010, BPS
- Data Sekunder (dari dalam maupun luar BPS)
- Indeks Harga Konsumen (IHK), BPS

v. Metoda Estimasi

Komponen PK-RT Tahunan diestimasi dengan metoda sbb:

1. Nilai pengeluaran konsumsi perkapita Susenas/Suseda (untuk PK-RT Tahunan)
2. Data poin 1 dikalikan dengan penduduk pertengahan tahun, dikalikan 12 (PKRT Tahunan)
3. Data poin 2 dikelompokkan menjadi 12 kelompok COICOP, dengan beberapa komoditas dikontrol secara tersendiri;
4. Terhadap data poin 3, dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan data sekunder atau data/indikator suplai;
5. Diperoleh nilai PK-RT Tahunan atas dasar harga berlaku(atas dasar harga Berlaku) ;
6. Susun Indeks implisit PK-RT berdasarkan IHK Kota (provinsi/kota terdekat);
7. Nilai PK-RT atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara membagi hasil poin 5 dengan poin 6.

Catatan:

Komponen PK-RT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan konsumsi rumah tangga triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SKKRT.

i Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri di dalam perekonomian suatu wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggota maupun bagi kelompok rumah tangga tertentu secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga yang ditawarkan dibawah tingkat harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

ii Konsep dan definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Untuk diketahui, sesuai dengan fungsinya LNP dapat dibedakan atas LNP yang melayani rumahtangga (LNPRT) dan LNP yang melayani bukan rumahtangga.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggota atau rumah tangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota yang dimaksud bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga/hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

iii. Cakupan

Nilai PK-LNPRT merupakan nilai output non-pasar yang dihasilkan oleh LNPRT. Nilai output non-pasar diestimasi berdasarkan nilai pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasional. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari :

- a. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis dan barang cetakan; pembayaran rekening listrik, air, telepon, teleks, faksimili; biaya rapat, seminar, perjamuan; biaya transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas; belanja barang dan jasa lainnya; sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lain
- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

iv. Sumber Data

- a. Survei Khusus Lembaga Nonprofit yang melayani Rumah tangga (SK-LNP), BPS
- b. SK-LNP Triwulanan (SK-LNPT), BPS
- c. Hasil *up-dating* direktori LNPRT, BPS

d. Indeks Harga Konsumen, BPS

v. Metoda Estimasi

Komponen PK-LNPRT Tahunan diestimasi dengan metoda sbb:

1. Nilai pengeluaran konsumsi per jenis lembaga dari hasil SK-LNP;
2. Hasil dari poin 1 dikalikan dengan banyaknya lembaga pada pertengahan tahun dari Direktori LNPRT;
3. Terhadap hasil poin 2 dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan indikator kegiatan hasil SK-LNP seperti jumlah tenaga kerja, penerima layanan, berbagai even seperti munas, rakerda, dan penanganan bencana;
4. Diperoleh nilai PK-LNPRT tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar hargaBerlaku);
5. Susun Indeks implisit PK-LNPRT berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat);
6. Nilai PK-LNPRT atas dasar harga Konstan (ADHK) diperoleh dengan membagi hasil poin 4 dengan poin 5.

Catatan :

Komponen PK-LNPRT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi LNPRT triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SK-LNPRT.

2.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH (PK-P)

i. Pendahuluan

Unit pemerintah merupakan unit institusi yang terbentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang legislatif, yudikatif, dan eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas teritori suatu wilayah atau negara. Pemerintah juga berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi individu atau kelompok rumah tangga tertentu, pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, serta berfungsi untuk mendistribusikan pendapatan melalui aktivitas transfer. Dari sudut pandang lain, unit pemerintah terlibat dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah berperan sebagai konsumen maupun produsen barang dan jasa, serta sebagai regulator yang menetapkan kebijakan di bidang fiskal maupun moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah melakukan aktivitas produksi dan investasi.

ii. Konsep dan Definisi

Nilai PK-P merupakan besarnya nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah untuk dikonsumsi oleh pemerintah itu sendiri. Nilai tersebut diestimasi dengan pendekatan pengeluaran, yakni sebesar nilai pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran kompensasi pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, serta nilai output dari unit Bank Indonesia. Nilai ini masih harus dikurangi nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan melalui unit produksi yang tak terpisahkan dari aktivitas pemerintahan secara keseluruhan. Aktivitas yang dimaksud mencakup aktivitas:

1. Memproduksi barang yang sejenis dengan barang yang diproduksi unit perusahaan seperti publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, dan pembibitan tanaman di kebun percobaan. Aktivitas menghasilkan barang-barangsemacam itu bersifat insidental dan di luar fungsi utama dari unit pemerintah.
2. Memproduksi jasa, seperti penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam parktek, pemerintah akan memungut biaya, namun umumnya biaya yang dikenakan tidak akan melebihi seluruh biaya yang dikeluarkan pemerintah. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi atau pendapatan jasa.

iii. Cakupan

Sektor pemerintah terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, pemerintah kabupaten/kota mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing.

PK-P kabupaten/kota mencakup: a). PK-P desa/kelurahan/nigariyang ada di wilayah kabupaten/kota;b). PK-P kabupaten/kota yang bersangkutan; c). PK-P pusat yang merupakan bagian dari PK-Pkabupaten/kota.

iv. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi PK-P kabupaten/kota tahunan adalah:

- a. Data realisasi APBD Tahunan, Kementerian Keuangan dan Bappeda
- b. Statistik Keuangan Daerah, BPS
- c. Output Bank Indonesia, Bank Indonesia
- d. Gaji Pegawai Negeri Sipil, Kementerian Keuangan dan Bappeda
- e. Indeks Harga dan Indeks Upah, BPS

f. Indeks perkembangan pengeluaran pemerintah daerah triwulanan, BPS

v. **Metoda Estimasi**

Komponen PK-P kabupaten/kota Tahunan diestimasi dengan menggunakan metoda:

$$\text{PK-P atas dasar harga Berlaku} = \text{Output} - \text{Penjualan barang dan jasa} + \text{Social transfer in kind} \\ \text{purchased market production} + \text{Output Bank Indonesia}$$

Output non pasar dihitung melalui pendekatan biaya operasional, seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja bantuan sosial dan belanja lain-lain.

Catatan :

1. Komponen PK-P Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi pemerintah daerah triwulanan
2. PK-P atas dasar harga Konstan diestimasi dengan men-deflate PK-P atas dasar harga Berlaku dengan menggunakan deflator berikut:

Jenis Belanja	Deflator	Keterangan
Belanja Pegawai	Indeks Upah	Sama dengan Nasional
Belanja Barang	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penyusutan	Indeks Implisit PMTB	
Belanja Bansos	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penerimaan barang dan jasa	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
Social Transfer in kind	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
Output BI		Neraca Jasa

i Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor penentu di dalam perkembangan atau pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dalam konteks PDRB, aktivitas investas yang dimaksud adalah investasi dalam bentuk fisik. Aktivitas investasi akan tercermin melalui komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori (PI). Komponen PMTB terkait dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang terlibat dalam proses produksi. Aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal, yakni dalam bentuk bangunan dan konstruksi lainnya; mesin dan perlengkapan; kendaraan; tumbuhan dan ternak; serta barang modal lainnya.

ii Konsep dan definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan barang modal yang ada pada unit produksi dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri, serta barang modal baru maupun barang modal bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer dan barter), serta pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya (*Cultivated Biological Resources/CBR*). Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, serta sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Dalam hal pengurangan barang modal yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal karena digunakan dalam proses produksi secara normal selama periode tertentu.

iii Cakupan

PMTB mencakup :

1. Penambahan dikurangi pengurangan barang modal baik baru maupun bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan dan konstruksi lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*);
2. Biaya alih kepemilikan atas aset non-finansial yang tidak diproduksi seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar barang modal, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan

usia pakai-nya seperti *overhaul* mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi.

iv Sumber Data

- a. Output industri konstruksi, BPS
- b. Nilai impor 2 digit HS, BPS
- c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang, BPS
- d. Laporan Keuangan Perusahaan, Data Sekunder dari luar BPS
- e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang, BPS
- f. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), BPS
- g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas), BPS
- h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum, BPS
- i. Publikasi Statistik Konstruksi, BPS
- j. Data Eksplorasi Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan Kementerian Pertanian.

v Metoda estimasi

Komponen PMTB diestimasi dengan menggunakan metoda langsung ataupun metoda tidak langsung tergantung ketersediaan data dimasing-masing daerah.

✓ Metoda Langsung:

PMTB atas dasar harga Berlaku (Domestik) = Barang Modal Domestik + TTM + Pajak atas Produk (PPN) + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Berlaku (Impor)= Barang Modal Impor + TTM +Bea Impor + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara men-*deflate* PMTB atas dasar harga Berlaku dengan IHPB sbb:

$$PMTB_{ADHK} = \frac{PMTB_{ADHB}}{IHPB}$$

IHPB yang digunakan adalah IHPB Nasional (2010=100) sesuai jenis barang modal.

✓ Metoda Tidak Langsung:

Pendekatan Supply : PMTB atas dasar harga Berlaku = Total Supply Barang x Rasio PMTB

Pendekatan Ekstrapolasi : PMTB atas dasar hargaKonstan (t) = PMTB atas dasar harga k (t-1) x Indeks Produksi (t)

i Pendahuluan

Dalam suatu perekonomian, inventori atau persediaan merupakan salah satu komponen penting yang dibutuhkan untuk kelangsungan suatu proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal. Komponen tersebut menjadi bagian dari pembentukan modal bruto atau investasi fisik, yang terjadi di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Komponen inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, sertabahan baku dan bahan penolong. Ketersediaan data tentang perubahan inventori pada suatu periode akuntansi menjadi penting guna memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

ii Konsep dan definisi

Pengertian sederhana dari inventori adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang lainnya, yang mempunyai nilai ekonomi atau manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian tersebut adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh produsen.

Nilai perubahan inventori merupakan selisih antara nilai inventori di akhir periode dengan nilai inventori pada awal periode (akuntansi). Perubahan inventori menjelaskan perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (bertanda positif) ataupun pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan dari proses produksi sehingga perlu dicadangkan, baik dalam bentuk bahan baku ataupun bahan penolong. Faktor ketidakpastian yang disebabkan oleh pengaruh dari faktor eksternal juga menjadi pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih disebabkan oleh unsur spekulasi, dengan harapan agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Sedangkan bagi pemerintah, pencadangan komoditas yang strategis dimaksudkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, sosial dan politik. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas, maka beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, tepung terigu, minyak goreng dan gula pasir perlu dicadangkan oleh pemerintah. Namun bagi rumahtangga, pengadaan inventori barang lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsi.

iii Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang sbb :

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Inventori menurut jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), mencakup semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, mencakup barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yang mencakup barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai);
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau digunakan sebagai bahan bakar atau persediaan; serta
- h. Persediaan pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

iv Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi komponen perubahan inventori adalah :

1. Laporan keuangan perusahaan hasil kegiatan survei atau *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
2. Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/ BUMD, Data Sekunder dari luar BPS
3. Data komoditas pertambangan, Statistik Pertambangan dan Penggalian BPS;
4. Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang, BPS;
5. Data komoditas perkebunan;
6. Indeks harga implisit PDRB industri terpilih;
7. Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih;
8. Data persediaan beras, Bulog; data semen, Asosiasi Semen Indonesia; data gula, Dewan Gula Indonesia; dan data ternak, Ditjennak Kementan.

v Metoda Estimasi

Komponen Perubahan Inventori (PI) diestimasi dengan menggunakan metoda revaluasi atau metoda deflasi, tergantung jenis komoditasnya.

- a. Metoda Revaluasi

Metoda ini digunakan untuk komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan

pertambahan.

PI atas dasar harga Berlaku = Volume inventori (t)-Volume inventori (t-1) x Harga per unit

PI atas dasar harga Konstan = PI atas dasar harga Berlaku / IHPB

b. Metoda Deflasi

Metoda ini digunakan untuk komoditas industri pengolahan dan komoditas lainnya.

PI atas dasar harga Konstan = Inventori (t) atas dasar harga Berlaku/IHPB (t)-
Inventori (t-1) atas dasar harga Berlaku/IHPB (t-1)

PI atas dasar harga Berlaku = PI atas dasar harga Konstan x IHPB rata-rata (t)

<https://nganjukkab.bps.go.id>

i Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintahan. Ragam barang dan jasa yang diproduksi maupun disparitas harganya menjadi faktor utama munculnya aktivitas tersebut. Wilayah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan-nya sendiri berusaha untuk mendatangkan dari luar wilayah atau bahkan dari luar negeri. Di sisi lain, wilayah yang memproduksi barang dan jasa melebihi kebutuhan domestik-nya, terdorong untuk memperluas pasar ke luar wilayah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas berbagai barang dan jasa semakin meningkat. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus dan distribusi barang dan jasa. Kondisi ini semakin mendorong aktivitas ekspor-impor dari dan kesuatu wilayah.

ii Konsep dan definisi

Ekspor-impor didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (melalui aktivitas penjualan/pembelian, barter, pemberian atau hibah) barang dan jasa antar residen wilayah tersebut dengan non-residen (yang berada di luar wilayah atau luar negeri).

iii Cakupan

Ekspor-Import ke dan dari suatu wilayah kabupaten/kota terdiri dari:

- a. Ekspor keluar provinsi/kabupaten/kota
- b. Impor dari luar provinsi/kabupaten/kota.

Selisih antara ekspor dan impor didefinisikan sebagai Net Ekspor.

iv Sumber Data

Nilai ekspor-impor wilayah kabupaten/kota didasarkan pada penghitungan Net Ekspor. Namun sering kali untuk mengestimasi tidak ada data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Kondisi inilah yang menyebabkan Net Ekspor kabupaten/kota diperlakukan sebagai item penyeimbang (*residual*), yakni perbedaan antara PDRB menurut pengeluaran dengan PDRB menurut lapangan usaha. Selanjutnya dilakukan pemisahan Net Ekspor menjadi ekspor dan impor dengan menggunakan metoda tidak langsung.

TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN NGANJUK BERDASARKAN PDRB PENGELUARAN TAHUN 2016-2020

3



PDRB 2020

Menurut Pengeluaran

26,60 T

Distribusi PDRB

3 Terbesar



70,18%

Konsumsi Rumah Tangga



56,79%

Import



45,91%

Export

Pertumbuhan PDRB

3 Terbesar



9,91%

Konsumsi Kesehatan



8,13%

Konsumsi Komunikasi



6,92%

Konsumsi Barang Pribadi & Jasa Perorangan

3.1 PERKEMBANGAN PDRB PENGELUARAN

Sebagaimana diketahui bahwa sejak tahun 2015, PDRB diestimasi dengan menggunakan tahun dasar yang baru, tahun 2010(2010=100) menggantikan tahun dasar lama, tahun 2000 (2000=100). Penyusunan PDRB dengan tahun dasar baru juga disertai dengan upaya untuk mengimplementasikan *System of National Accounts (SNA)* yang baru, SNA 2008. Ke dua hal tersebut tentu berdampak pada besaran maupun struktur PDRB serta indikator ekonomi yang diturunkan dari data PDB/PDRB tersebut.

Secara total, PDRB Kabupaten Nganjuk atas dasar harga Berlaku di tahun 2020 melambat sebesar -0,19%, yakni dari 26.651.116,15 juta Rupiah menjadi 26.601.161,82 juta Rupiah. Jika dinilai atas dasar harga Konstan 2010, mengalami perlambatan, yakni dari 18.304.204,58 juta Rupiah (2010=100) menjadi 17.990.364,53 juta Rupiah (2010=100), atau melambat sebesar -1,71 %.

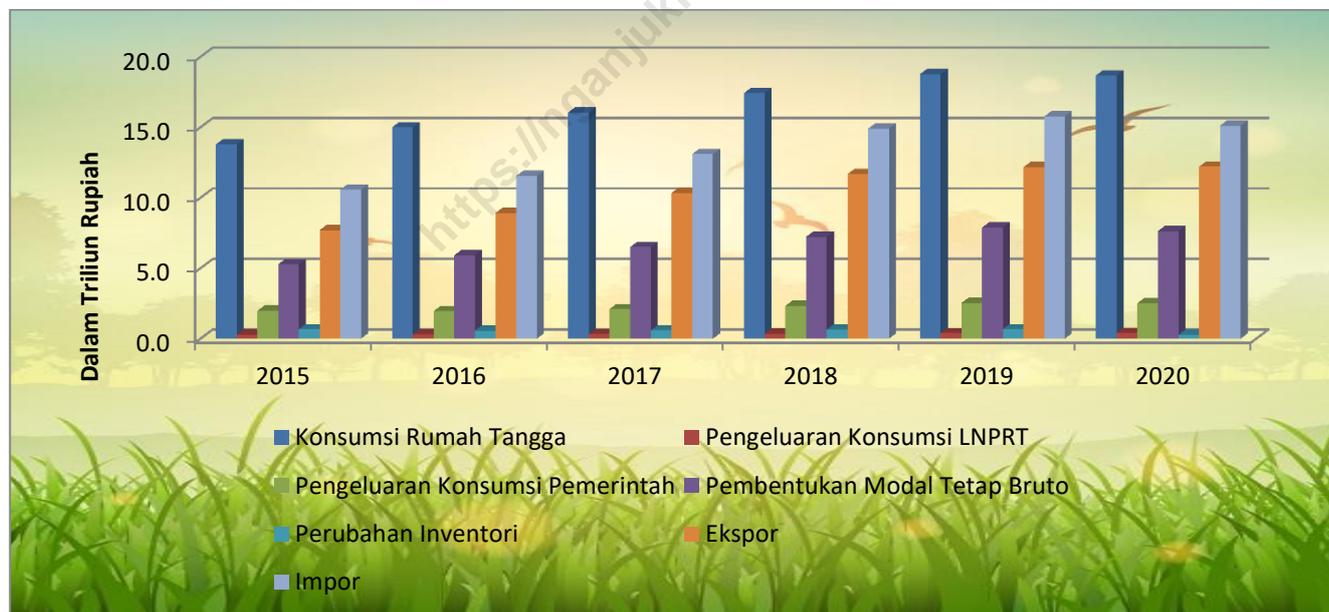
Di tengah kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cenderung melemah, perekonomian Kabupaten Nganjuk periode 2015-2020 dapat tetap tumbuh sekitar 5%, yakni sebesar 5,18%; 5,29%; 5,26%; 5,38%; 5,36% dan minus 1,71%. Peningkatan volume ekonomi tersebut tercermin baik dari sisi produksi (*supply side*) maupun sisi permintaan akhir (*demand side*). Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada kategori Perdagangan Besar dan Eceran yang tumbuh sekitar 5% setiap tahunnya. Dari sisi permintaan akhir, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nganjuk didominasi pertumbuhan komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga (PK-RT), yang menyumbang lebih dari separuh total PDRB.

Besaran PDRB Kabupaten Nganjuk atas dasar harga Berlaku pada periode tahun 2015-2020 terus meningkat cukup signifikan, yakni sebesar 19.122.237,83 juta Rupiah (2015); 21.113.913,82 juta Rupiah (2016); 22.799.234,53 juta Rupiah (2017); 24.782.292,72 juta Rupiah (2018); 26.651.116,15 juta Rupiah (2019); dan 26.601.161,82 juta Rupiah (2020) . Peningkatan ini dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume. Peningkatan PDRB sisi produksi diikuti oleh peningkatan PDRB dari sisi permintaan akhir atau PDRB pengeluaran. Peningkatan PDRB menurut komponen pengeluaran Kabupaten Nganjuk pada periode 2015-2020 dapat dilihat dari tabel 1 dan grafik 1 berikut ini:

Tabel 1. PDRB atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Nganjuk
Table 1. GRDP at current price by Expenditure, Region Nganjuk
2015-2020

Komponen Pengeluaran/ <i>Expenditure item</i>	(Juta Rp/ <i>Million Rp</i>)					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Konsumsi Rumah Tangga/ <i>Household Consumption</i>	13.787.596,87	14.993.523,64	16.042.072,36	17.430.134,27	18.771.710,10	18.668.917,95
2. Konsumsi LNPRT/ <i>NPISH Consumption</i>	286.526,16	312.641,28	329.372,92	363.030,40	394.287,44	404.346,43
3. Konsumsi Pemerintah/ <i>Government Consumption</i>	1.983.407,41	1.946.287,59	2.096.825,39	2.332.254,86	2.531.086,92	2.513.327,04
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto/ <i>Gross Fixed Capital Formation</i>	5.275.072,42	5.912.253,32	6.499.983,88	7.228.998,88	7.883.633,65	7.634.199,28
5. Perubahan Inventori/ <i>Changes of Inventory</i>	663.724,24	572.843,37	586.946,77	652.000,58	668.518,21	276.244,99
6. Ekspor/ <i>Export</i>	7.695.980,22	8.925.459,71	10.345.718,21	11.682.358,41	12.166.942,22	12.211.995,90
7. Impor/ <i>Import</i>	10.570.069,50	11.549.095,09	13.101.685,01	14.906.484,68	15.765.062,38	15.107.869,77
PDRB / GRDP	19.122.237,83	21.113.913,82	22.799.234,53	24.782.292,72	26.651.116,15	26.601.161,82

Grafik 1. PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Nganjuk 2015 - 2020



Selain dinilai atas dasar harga yang berlaku, PDRB pengeluaran juga dapat dinilai atas dasar harga Konstan 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang devaluasi dengan harga tahun 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga). PDRB pengeluaran atas dasar harga Konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau

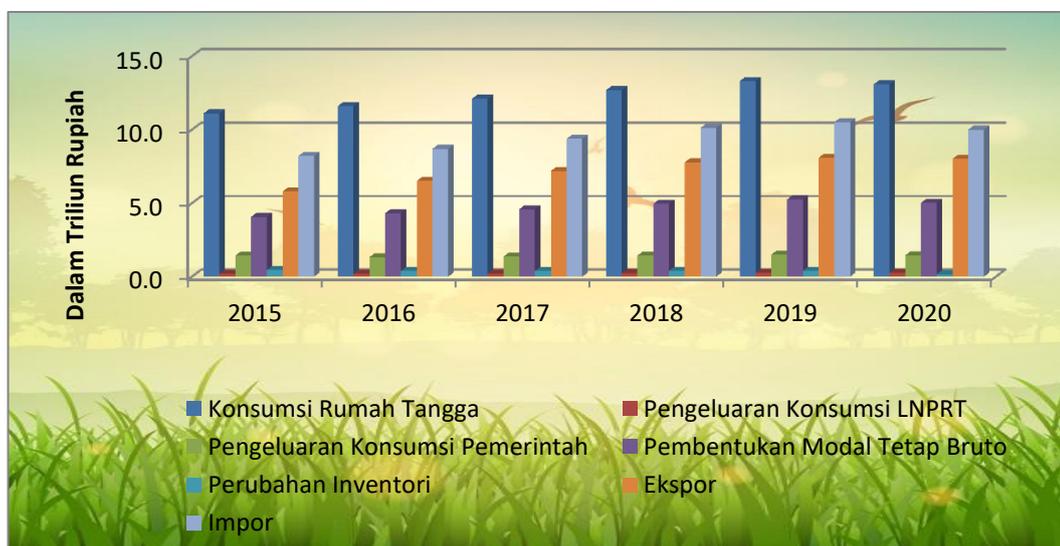
konsumsi akhir. Peningkatan nilai PDB atas dasar harga Konstan 2010 Kabupaten Nganjuk pada periode 2015-2020 dapat dilihat dari tabel 2 dan grafik 2 berikut ini:

Tabel 2. PDRB atas dasar harga Konstan Menurut Pengeluaran, Kabupaten Nganjuk
Table 2. GRDP at 2010 Constant Price by Expenditure, Region Nganjuk
2015-2020

Komponen Pengeluaran/ <i>Expenditure item</i>	(Juta Rp/ <i>Million Rp</i>)					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Konsumsi Rumah Tangga/ <i>Household Consumption</i>	11.115.429,82	11.608.297,67	12.107.104,51	12.688.762,15	13.315.737,97	13.086.028,04
2. Konsumsi LNPRT/ <i>NPISH Consumption</i>	206.035,36	216.427,93	221.246,16	236.327,47	250.637,11	251.615,68
3. Konsumsi Pemerintah/ <i>Government Consumption</i>	1.436.026,49	1.323.273,45	1.367.290,23	1.438.494,14	1.505.500,83	1.455.411,02
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto/ <i>Gross Fixed Capital Formation</i>	4.070.748,72	4.321.916,00	4.586.283,98	4.956.721,93	5.259.592,51	5.026.389,50
5. Perubahan Inventori/ <i>Changes of Inventory</i>	458.796,20	381.426,10	389.172,68	394.371,50	397.731,32	161.406,34
6. Ekspor/ <i>Export</i>	5.802.289,26	6.512.412,16	7.190.996,52	7.783.921,99	8.093.486,74	8.016.813,82
7. Impor/ <i>Import</i>	8.213.975,10	8.701.939,39	9.376.470,38	10.125.341,58	10.518.481,90	10.007.299,87
PDRB / GRDP	14.875.350,75	15.661.813,91	16.485.623,70	17.373.257,60	18.304.204,58	17.990.364,53

Dari tabel 2, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga Konstan di Kabupaten Nganjuk meningkat, yakni sebesar 14.875.350,75 juta Rupiah (2015); 15.661.813,91 juta Rupiah (2016); 16.485.623,70 juta Rupiah(2017); 17.373.257,60 juta Rupiah (2018); dan 18.304.204,58 juta Rupiah (2019); dan 17.990.364,53 juta Rupiah (2020). Sedangkan dari grafik 3, terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Nganjuk cenderung meningkat, yakni dari 5,18 persen pada tahun 2015 menjadi 5,36 persen(2019) dan menjadi minus 1,71 persen di tahun 2020 akibat pandemi covid19.

Grafik 2. PDRB atas dasar harga Konstan Menurut Pengeluaran, Kabupaten Nganjuk 2015 - 2020

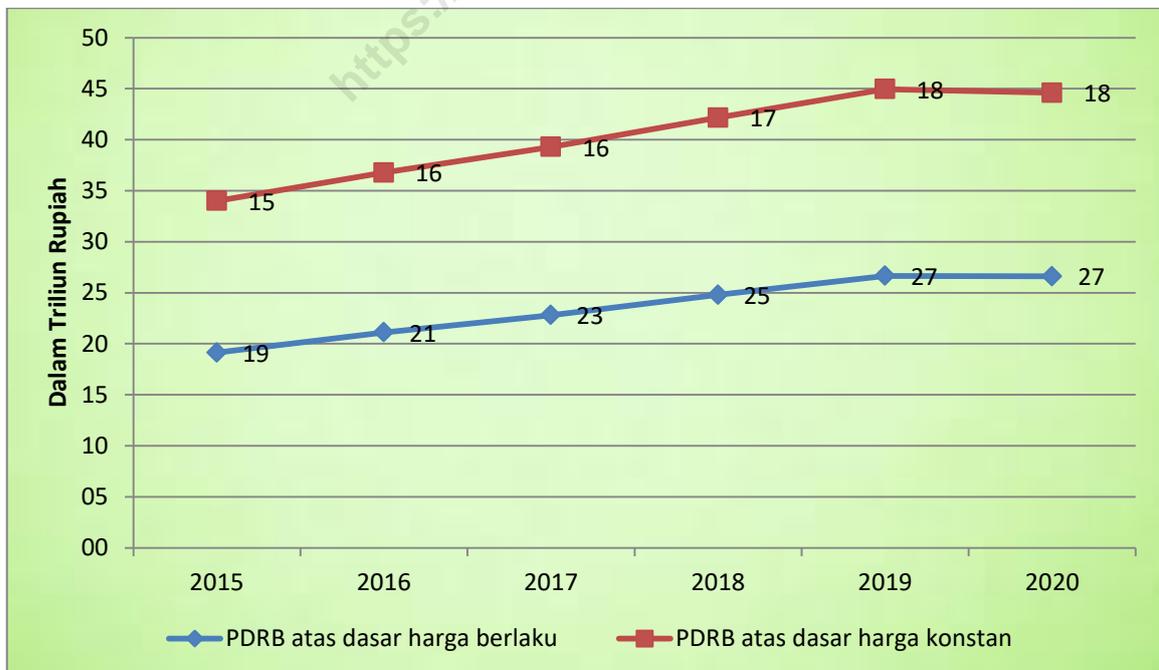


**Grafik 3. Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran, Kabupaten Nganjuk
2015 - 2020 (Persen)**



**Grafik 4. Perbandingan PDRB atas dasar harga Berlaku dan atas dasar harga Konstan 2010
Menurut Pengeluaran, Kabupaten Nganjuk**

Figure 4. Comparing of GRDP at current price and GRDP at Constant Price 2010, Region Nganjuk, 2015-2020



Dari grafik 4, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga Berlaku selalu lebih tinggi dari PDRB atas dasar harga Konstan. Perbedaan tersebut sangat dipengaruhi oleh perubahan harga yang cenderung meningkat. Sedangkan pada PDB atas dasar harga Konstan, pengaruh dari harga tersebut telah ditiadakan. Sama halnya PDRB atas dasar harga Berlaku, sebagian besar pengeluaran akhir PDRB atas dasar harga Konstan juga menunjukkan peningkatan.

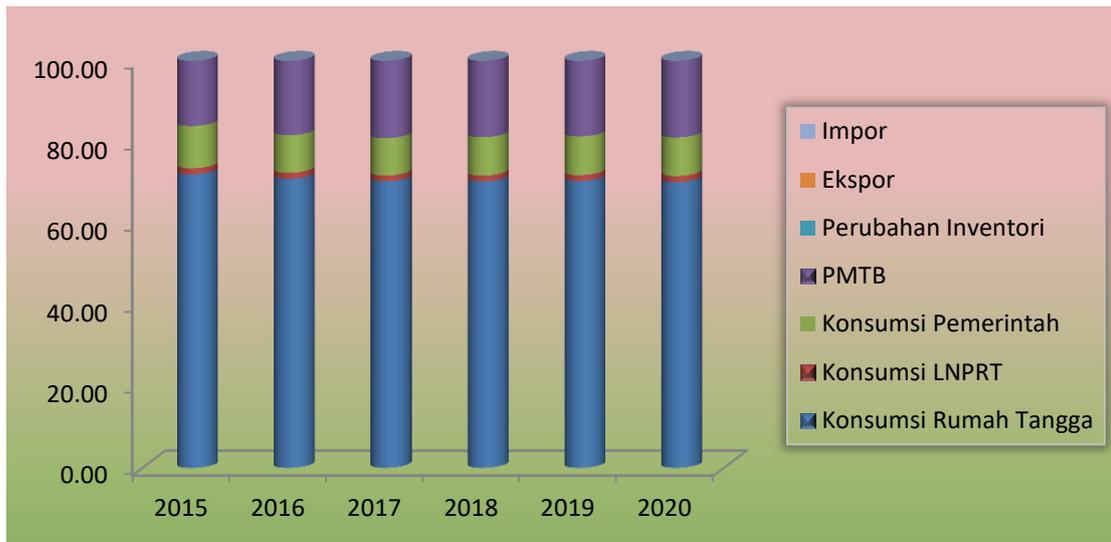
Tabel 3. Distribusi PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Nganjuk
Table 3. Distribution of GRDP at Current Price by Expenditure, Region Nganjuk
 2015-2020 (persen)

Komponen Pengeluaran/ <i>Expenditure item</i>	2015	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Konsumsi Rumah Tangga/ <i>Household Consumption</i>	72,10	71,01	70,36	70,33	70,43	70,18
2. Konsumsi LNPRT/ <i>NPISH Consumption</i>	1,50	1,48	1,44	1,46	1,48	1,52
3. Konsumsi Pemerintah/ <i>Government Consumption</i>	10,37	9,22	9,20	9,41	9,50	9,45
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto/ <i>Gross Fixed Capital Formation</i>	27,59	28,00	28,51	29,17	29,58	28,70
5. Perubahan Inventori/ <i>Changes of Inventory</i>	3,47	2,71	2,57	2,63	2,51	1,04
6. Ekspor/ <i>Export</i>	40,25	42,27	45,38	47,14	45,65	45,91
7. Impor/ <i>Import</i>	55,28	54,70	57,47	60,15	59,15	56,79
PDRB / <i>GRDP</i>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Terbentuknya total PDRB pengeluaran tidak terlepas dari kontribusi seluruh komponen, yang terdiri dari komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), ekspor neto (E) atau ekspor minus impor barang dan jasa.

Dari tabel 3 terlihat bahwa selama periode 2015-2020, PDRB Kabupaten Nganjuk, sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumahtangga (PK-RT). Pengeluaran untuk akitvitas pembentukan modal (PMTB) juga mempunyai kontribusi yang relatif besar, yakni 28,70 persen. Meskipun komponen ekspor berkontribusi sebesar 45,91 persen, namun di sisi lain komponen impor sebagai komponen pengurang dalam PDRB juga masih berkontribusi relatif besar, yakni 56,79 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian kebutuhan domestik masih harus dipenuhi oleh produk yang berasal dari luar wilayah atau bahkan luar negeri (impor).

Grafik 5. Distribusi PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Nganjuk 2015 - 2020 (Persen)



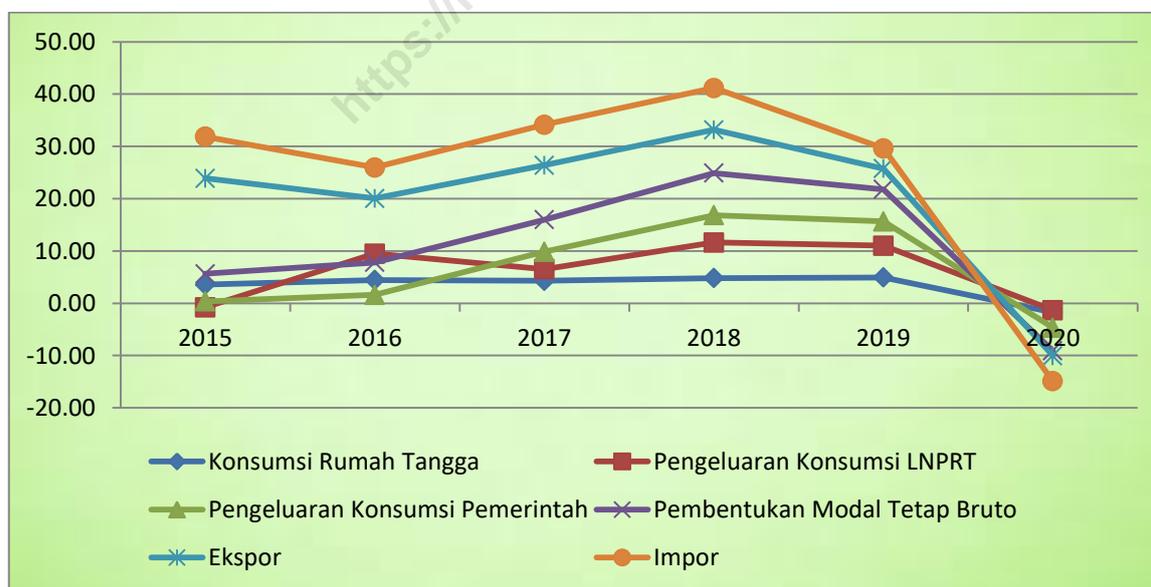
Kontribusi komponen konsumsi pemerintah (PK-P) terhadap PDRB Kabupaten Nganjuk sebesar 9,45 persen. Hal tersebut menunjukkan peran pemerintah dalam menyerap PDRB tidak terlalu besar. Pada periode 2015-2020 perdagangan antar wilayah menunjukkan nilai ekspor yang lebih rendah dari nilai impor (dalam kondisi “defisit” atau merugi) yang artinya bahwa sebagian kebutuhan domestik masih harus dipenuhi oleh produk yang berasal dari luar wilayah Kabupaten Nganjuk.

Agregat makro lain yang diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Indikator ekonomi ini menggambarkan kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Sebagaimana terlihat dari tabel 4, selama periode tahun 2015 - 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nganjuk mengalami fluktuasi, yakni sebesar 5,18 persen (2015); 5,29 persen (2016); 5,26 persen (2017); 5,38 persen (2018); 5,36 persen (2019) dan minus 1,71 persen (2020). Sedangkan dari grafik 6 akan terlihat pertumbuhan masing-masing komponen PDRB selama periode tahun yang sama.

**Tabel 4. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran,
Kabupaten Nganjuk**
*Table 4. Growth rate of GRDP at 2010 Constant Price by Expenditure,
Region Nganjuk 2015-2020 (persen)*

Komponen Pengeluaran/ <i>Expenditure item</i>	(%)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Konsumsi Rumah Tangga/ <i>Household Consumption</i>	3,55	4,43	4,30	4,80	4,94	-1,73
2. Konsumsi LNPRT/ <i>NPISH Consumption</i>	-4,34	5,04	2,23	6,82	6,06	0,39
3. Konsumsi Pemerintah/ <i>Government Consumption</i>	1,15	-7,85	3,33	5,21	4,66	-3,33
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto/ <i>Gross Fixed Capital Formation</i>	5,28	6,17	6,12	8,08	6,11	-4,43
5. Perubahan Inventori/ <i>Changes of Inventory</i>	-	-	-	-	-	-
6. Ekspor/ <i>Export</i>	18,24	12,24	10,42	8,25	3,98	-0,95
7. Impor/ <i>Import</i>	7,98	5,94	7,75	7,99	3,88	-4,86
PDRB / GRDP	5,18	5,29	5,26	5,38	5,36	-1,71

**Grafik 6. Pertumbuhan PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran,
Kabupaten Nganjuk 2015-2020 (Persen)**



Indeks implisit⁶ PDRB pengeluaran menggambarkan besarnya perubahan harga yang terjadi dari sisi konsumen (rumah tangga, LNPRT, pemerintah, dan perusahaan) akhir barang dan jasa, baik

⁶ Indeks perkembangan

yang digunakan untuk keperluan konsumsi, investasi maupun ekspor/impor. Dari tabel 5 akan terlihat tingkat kenaikan harga selama periode tahun 2015 - 2020, baik perubahan harga yang terjadi secara umum maupun pada masing-masing komponen.

Tabel 5. Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran, Kabupaten Nganjuk
Table 5. Implicit Indices of GRDP by Expenditure, Region Nganjuk
2015-2020

Komponen Pengeluaran/ <i>Expenditure item</i>	2015	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Konsumsi Rumah Tangga/ <i>Household Consumption</i>	124,04	129,16	132,50	137,37	140,97	142,66
2. Konsumsi LNPRT/ <i>NPISH Consumption</i>	139,07	144,46	148,87	153,61	157,31	160,70
3. Konsumsi Pemerintah/ <i>Government Consumption</i>	138,12	147,08	153,36	162,13	168,12	172,69
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto/ <i>Gross Fixed Capital Formation</i>	129,58	136,80	141,73	145,84	149,89	151,88
5. Perubahan Inventori/ <i>Changes of Inventory</i>	-	-	-	-	-	-
6. Ekspor/ <i>Export</i>	132,64	137,05	143,87	150,08	150,43	152,33
7. Impor/ <i>Import</i>	128,68	132,72	139,73	147,22	149,88	150,97
PDRB / GRDP	128,55	134,81	138,30	142,65	145,60	147,86

3.2 PERKEMBANGAN KOMPONEN PDRB PENGELUARAN

Perubahan struktur perekonomian suatu wilayah sebagai akibat dari upaya pembangunan ekonomi yang dilaksanakan pada periode tertentu, tidak terlepas dari perilaku masing-masing komponen pengguna akhir. Setiap komponen mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuan akhir penggunaan barang dan jasa. Data empiris menunjukkan bahwa sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia pada periode tertentu digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir oleh rumah tangga, LNPRT dan pemerintah, sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori. Berikut perilaku masing-masing komponen PDRB pengeluaran Kabupaten Nganjuk untuk periode 2015-2020.

3.2.1. Konsumsi Akhir Rumahtangga

Komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT) merupakan pengeluaran terbesar atas berbagai barang dan jasa yang tersedia. Data berikut menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kabupaten Nganjuk ternyata sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Dengan kata lain, sebagian besar produk (domestik) yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Nganjuk maupun produk (impor) yang didatangkan dari luar wilayah atau luar negeri akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir oleh rumah tangga.

Dalam suatu perekonomian, fungsi utama dari institusi rumah tangga adalah sebagai konsumen akhir (*final consumer*) atas barang dan jasa yang tersedia, termasuk konsumsi oleh rumah tangga khusus (seperti penjara, asrama dan lain-lain). Selanjutnya, berbagai jenis barang dan jasa yang dikonsumsi tersebut akan diklasifikasikan menurut 7 (tujuh) kelompok COICOP (*Classification of Individual Consumption by Purpose*), yaitu kelompok makanan dan minuman selain restoran; pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya; perumahan dan perlengkapan rumah tangga; kesehatan dan pendidikan; angkutan dan komunikasi; restoran dan hotel; serta kelompok barang dan jasa lainnya.

Data berikut menunjukkan bahwa pada periode tahun 2016 – 2020 pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan, baik dari sisi nominal (atas dasar harga berlaku) maupun secara riil (atas dasar harga konstan). Kenaikan jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga. Pada gilirannya kenaikan tersebut juga akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Tabel 6. Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah Tangga, Kabupaten Nganjuk
Table 6. Trend of Using on Final Household Consumption of Region Nganjuk
2016 – 2020⁷

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga/ Total of Household Consumption					
a. ADHB/ Current Prices (Juta Rp/Trillion Rp)	14.993.523,64	16.042.072,36	17.430.134,27	18.771.710,10	18.668.917,95
b. ADHK 2010 /2010 Constant Prices (Juta Rp/Trillion Rp)	11.609.097,67	12.107.104,51	12.688.762,15	13.315.737,97	13.086.028,04
Proporsi terhadap PDRB/ Proportion to GRDP (% ADHB / Current Prices)	71.01	70.36	70.33	70.43	70.18
Rata-rata konsumsi per-Rumah Tangga/tahun (Ribu Rp)					
a. ADHB	57.370,95	61.182,70	66.280,64	71.198,61	70.647,96
b. ADHK 2010	44.417,78	46.175,16	48.250,88	50.504,83	49.520,88
Rata-rata konsumsi per-kapita/tahun / Average of per-capita consumption (Ribu Rp/Thousand Rp)					
a. ADHB/ Current Prices	14.342,72	15.295,66	16.570,14	17.799,65	17.661,99
b. ADHK 2010/2010 Constant Prices	11.104,43	11.543,78	12.062,71	12.626,21	12.380,22
Pertumbuhan/Growth ⁷					
a. Total konsumsi RT	4,43	4,30	4,80	4,94	-1,73
b. Per-Rumah Tangga	4,07	3,96	4,50	4,67	-1,95
c. Perkapita/Per capita	4,07	3,96	4,50	4,67	-1,95
Jumlah Rumah Tangga (unit)	261.343	262.199	262.975	263.653	264.253

Selama periode 2016 – 2020 proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap total PDRB meningkat, yaitu 71,01 persen (2016); 70,36 persen (2017); 70,33 persen (2018); 70,43 persen

⁷ Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK 2010)

(2019); dan 70,18 persen (2020). Posisi tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 71,01 persen dan terendah pada tahun 2017 sebesar 70,36 persen.

Pada masa pemulihan ekonomi, biasanya institusi rumah tangga memperbaiki perilaku atau pola konsumsinya. Hal tersebut terjadi karena secara umum tingkat pendapatan masyarakat akan naik dan di sisi lain persediaan atau penawaran berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik bertambah. Kondisi semacam ini memicu naiknya belanja untuk keperluan konsumsi, termasuk konsumsi rumah tangga.

Secara rata-rata, konsumsi per rumah tangga dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, baik menurut atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2016, setiap rumah tangga di Kabupaten Nganjuk menghabiskan dana sekitar 57.370,95 ribu Rupiah setahun untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya. Pengeluaran tersebut meningkat menjadi 61.182,70 ribu Rupiah (2017); 66.280,64 ribu Rupiah (2018); 71.198,61 ribu Rupiah (2019) dan 70.647,96 ribu Rupiah (2020). Sementara itu, atas dasar harga Konstan (2010) rata-rata konsumsi per rumah tangga tumbuh pada kisaran minus 1,95 - 5 persen, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 4,67 persen.

Di sisi lain, kenaikan rata-rata konsumsi per-kapita cenderung searah dengan kenaikan jumlah penduduk. Pertumbuhan rata-rata konsumsi per-kapita menunjukkan peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Kondisi ini menunjukkan rata-rata konsumsi setiap penduduk meningkat, baik secara kuantitas (*volume*) maupun secara nilai (termasuk peningkatan kualitas). Rata-rata konsumsi per-kapita secara “riil” meningkat pada kisaran minus 1,95 s.d 4,67 persen. Peningkatan tersebut tentu berpengaruh pada struktur konsumsi rumah tangga, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 7. Struktur Komponen Konsumsi Rumah tangga, Kabupaten Nganjuk 2015 - 2020
Table 7. Structure of Household Final Consumption Expenditure, Region Nganjuk
2015 – 2020 (Persen)

Kelompok Konsumsi/ <i>Consumption group</i>	2015	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok/ <i>Food, beverages, and tobacco</i>	30,62	30,32	29,77	29,55	29,32	31,34
b. Pakaian dan Alas Kaki/ <i>Clothing and footwear</i>	3,12	3,07	3,14	3,14	3,07	3,07
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah/ <i>Housing, household equipment and routine household maintenance</i>	8,35	8,32	8,29	8,17	8,02	8,45
d. Kesehatan dan Pendidikan/ <i>Health and education</i>	6,88	6,89	6,98	6,94	6,84	7,51
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya/ <i>Transport, Communication, Recreation and culture</i>	26,69	26,72	27,08	27,42	27,87	23,47
f. Hotel dan Restoran/ <i>Hotels, and restaurants</i>	19,26	19,53	19,57	19,62	19,77	20,52
g. Lainnya/ <i>Others</i>	5,08	5,14	5,16	5,16	5,11	5,64
Total Konsumsi/<i>Total of consumption</i>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Pada tahun 2015 pertumbuhan komponen konsumsi rumahtangga sebesar 3,55 persen. Kemudian, berturut-turut sebesar 4,43 persen (2016); 4,30 persen (2017); 4,80 persen (2018); 4,94 persen (2019) dan minus 1,73 persen (2020). Sementara itu rata-rata konsumsi per-kapita pada masing-masing tahun adalah 3,16 persen (2015); 4,07 persen (2016); 3,96 persen (2017); 4,50 persen (2018); 4,67 persen (2019) dan minus 1,95 persen (2020). Dari data tersebut nampak bahwa peningkatan total konsumsi “riil” rumah tangga lebih tinggi dari peningkatan jumlah penduduk yang berada pada kisaran 0,23 - 0,50 persen. Hal ini mengindikasikan telah terjadi perbaikan pada tingkat kesejahteraan masyarakat, meskipun tidak dapat dijelaskan lebih jauh melalui perangkat data PDRB ini.

Tabel 8. Pertumbuhan Riil Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga di Kabupaten Nganjuk, Tahun 2015 – 2020 (Persen)

Kelompok Konsumsi	2015	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	2,42	2,79	2,97	4,31	4,10	4,36
b. Pakaian dan Alas Kaki	4,65	3,37	4,39	3,60	3,71	-2,30
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah	4,74	5,28	4,44	3,90	3,73	3,03
d. Kesehatan dan Pendidikan	5,07	4,83	4,32	4,09	3,62	7,13
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	5,10	5,77	5,68	6,46	6,43	-14,17
f. Hotel dan Restoran	2,55	4,69	4,09	4,18	5,49	0,98
g. Lainnya	1,11	4,71	4,75	3,79	3,99	6,92
Konsumsi Bukan Makanan	4,06	5,15	4,86	5,01	5,29	-4,23
Konsumsi Akhir Rumah Tangga	3,55	4,43	4,30	4,80	4,94	-1,73

Dilihat dari pertumbuhan “riil” nya, pengeluaran rumah tangga untuk kelompok bukan makanan menunjukkan fluktuasi, dengan masing-masing sebesar 4,06 persen (2015); 5,15 persen (2016); 4,86 persen (2017)); 5,01 persen (2018); 5,29 persen (2019) dan minus 4,23 persen (2020). Pertumbuhan “riil” ini menunjukkan adanya perubahan konsumsi rumah tangga dalam bentuk kuantum (volume) dari waktu ke waktu. Informasi ini menunjukkan terjadinya peningkatan kemakmuran masyarakat, meskipun mungkin hanya dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu

Sementara itu, tingkat perubahan harga yang secara implisit disajikan dalam Tabel 9, menunjukkan peningkatan setiap tahun-nya untuk masing-masing kelompok pengeluaran konsumsi rumah tangga. Peningkatan harga relatif tinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 4,13 persen utamanya pada harga kelompok Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya, serta Hotel dan Restoran dan kelompok lainnya.

Tabel 9. Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Nganjuk
Table 9. Implicit Growth (Price Indices) of Household Final Consumption Expenditure, Region Nganjuk 2015 – 2020^s

Kelompok Konsumsi/ <i>Consumption group</i>	2015	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)
g. Makanan, Minuman, dan Rokok/ <i>Food, beverages, and tobacco</i>	3,56	4,75	2,03	3,40	2,64	1,87
h. Pakaian dan Alas Kaki/ <i>Clothing and footwear</i>	0,89	3,78	4,59	4,94	1,65	1,63
i. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah/ <i>Housing, household equipment and routine household maintenance</i>	1,70	2,89	2,08	3,04	1,92	1,65
j. Kesehatan dan Pendidikan/ <i>Health and education</i>	5,77	3,87	3,93	3,72	2,47	1,89
k. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya/ <i>Transport, Communication, Recreation and culture</i>	1,69	2,94	2,62	3,33	2,85	-2,40
l. Hotel dan Restoran/ <i>Hotels, and restaurants</i>	3,43	5,37	2,99	4,56	2,84	2,27
g. Lainnya/ <i>Otthers</i>	2,66	5,07	2,54	4,58	2,65	2,63
Konsumsi Akhir Rumah Tangga	2,87	4,13	2,59	3,67	2,63	1,20

3.2.2. Konsumsi Akhir LNPRT

Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) adalah salah satu unit institusi yang melakukan kegiatan produksi, konsumsi dan akumulasi aset. Keberadaannya diakui oleh hukum atau masyarakat, terpisah dari orang atau entitas lain yang memiliki atau mengendalikan.

^sDiturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB)

Dalam kegiatannya, LNPRT merupakan mitra pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah sosial seperti kemiskinan dan lingkungan hidup.

**Tabel 10. Perkembangan Pengeluaran Akhir Konsumsi LNPRT
Kabupaten Nganjuk**
*Table 10. Trend of NPISH Final Consumption Expenditure, Region Nganjuk
2015 - 2020*

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Total Konsumsi LNPRT						
a. ADHB (Juta Rp)	286.526,16	312.641,28	329.372,92	363.030,40	394.287,44	404.346,43
b. ADHK 2010 (Juta Rp)	206.035,36	216.427,93	221.246,16	236.327,47	250.637,11	251.615,68
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	1,50	1,48	1,44	1,46	1,48	1,52
Pertumbuhan(ADHK 2010)	-4,34	5,04	2,23	6,82	6,06	0,39

Total pengeluaran konsumsi LNPRT dalam kurun waktu tahun 2015-2020 mengalami peningkatan baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Pada tahun 2015 konsumsi LNPRT sebesar 286.526,16 juta rupiah, kemudian pada tahun-tahun berikutnya yaitu dan 312.641,28 juta rupiah (2016) dan 329.372,92 juta rupiah (2017); 363.030,40 juta rupiah (2018) dan 394.287,44 juta rupiah (2019) dan 404.346,43 juta rupiah (2020). Pertumbuhan pengeluaran konsumsi LNPRT tahun dasar 2010 berfluktuasi dengan nilai persentase berturut-turut adalah minus 4,34 persen (2015); 5,04 persen (2016); 2,23 persen (2017); 6,82 persen (2018); 6,06 persen (2019) dan 0,39 persen (2020). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 6,82 persen .

3.2.3. Konsumsi Akhir Pemerintah

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Individu dan Pengeluaran Konsumsi Kolektif. Barang dan jasa individu merupakan barang dan jasa privat, dimana ciri-ciri barang privat adalah a) *Scarcity*, yaitu ada kelangkaan/keterbatasan dalam jumlah. b) *Excludable consumption*, yaitu konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi persyaratan tertentu (biasanya harga). c) *Rivalrous competition*, yaitu konsumsi oleh satu konsumen akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan pihak lain untuk melakukan hal serupa. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa individu adalah jasa pelayanan kesehatan pemerintah di rumah sakit/puskesmas dan jasa pendidikan di sekolah/universitas negeri.

Sedangkan barang dan jasa kolektif ekuivalen dengan barang publik yang memiliki ciri a) *Non rivalry*, yaitu pengeluaran satu konsumen terhadap suatu barang tidak mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut. b) *Non excludable*, yaitu apabila suatu barang publik tersedia, maka tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh

manfaat dari barang tersebut atau dengan kata lain setiap orang memiliki akses ke barang tersebut. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa kolektif adalah jasa pertahanan yang dilakukan TNI dan keamanan yang dilakukan kepolisian.

Tabel 11. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Nganjuk
Table 11. Trend of Government Final Consumption Expenditure, Region Nganjuk 2015 - 2020¹

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Total Konsumsi Pemerintah						
a. ADHB (<i>Juta Rp</i>)	1.983.407,41	1.946.287,59	2.096.825,39	2.332.254,86	2.531.086,92	2.513.327,04
b. ADHK 2010 (<i>Juta Rp</i>)	1.436.026,49	1.323.273,45	1.367.290,23	1.438.494,14	1.505.500,83	1.455.411,02
Proporsi terhadap PDRB						
(% - ADHB)	10,37	9,22	9,20	9,41	9,50	9,45
Konsumsi Pemerintah per-kapita (<i>Ribu Rp</i>)						
a. ADHB	1.903,98	1.861,81	1.999,26	2.217,18	2.400,02	2.377,77
b. ADHK 2010	1.378,52	1.265,84	1.303,67	1.367,52	1.427,54	1.376,91
Konsumsi Pemerintah per-pegawai pemerintah (<i>Ribu Rp</i>)						
a. ADHB	104.012,14	102.936,49	112.137,11	126.018,05	137.853,66	137.925,54
b. ADHK 2010	75.306,86	69.986,12	73.121,95	77.725,74	81.995,92	79.869,57
<u>Pertumbuhan[1]</u>						
a. Total konsumsi pemerintah	1,15	-7,85	3,33	5,21	4,66	-3,33
b. Konsumsi perkapita	0,76	-8,17	2,99	4,90	4,39	-3,55
c. Konsumsi per-pegawai	2,16	-7,07	4,48	6,30	5,49	-2,59
<u>Jumlah Pegawai Pemerintah[2]</u>						
	19,069	18,908	18,699	18,507	18,361	18,222
Jumlah penduduk (jiwa)						
	1.041.716	1.045.375	1.048.799	1.051.900	1.054.611	1.057.011

¹ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan /ADHK 2010)

¹ Tidak termasuk polisi dan militer

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2015 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah atas dasar harga berlaku adalah sebesar 1.983.407,41 juta rupiah, kemudian pada tahun-tahun berikutnya sebesar 1.946.287,59 juta rupiah (2016), 2.096.825,39 juta rupiah (2017), 2.332.254,86 juta rupiah (2018), 2.531.086,92 juta rupiah (2019), dan 2.513.327,04 juta rupiah (2020). Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan 2010, yang juga mengalami peningkatan pada masing-masing tahun, tetapi mengalami perlambatan di tahun 2020 akibat pandemic covid-19. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

Menarik untuk dicermati lebih lanjut bahwa proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB juga mengalami fluktuasi, dari 10,37 persen (tahun 2015) hingga menjadi 9,45 persen (tahun 2020). Sepanjang periode tersebut, proporsi terendah terjadi pada tahun 2017 sebesar 9,20 persen; sedangkan proporsi tertinggi pada tahun 2015 sebesar 10,37 persen.

Salah satu fungsi pemerintah adalah memberikan jasa layanan pada publik atau masyarakat dalam bentuk jasa kolektif maupun individual. Dalam praktek, pengeluaran pemerintah ini selalu dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik), meskipun tidak seluruh masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung. Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total menunjukkan peningkatan, hal ini diikuti oleh adanya peningkatan pada rata-rata konsumsi pemerintah per-kapita. Pada tahun 2015 konsumsi pemerintah per-kapita atas dasar harga berlaku sebesar 1.903,98 ribu rupiah, terus meningkat pada tahun-tahun setelah itu, yaitu menjadi 1.861,81 ribu rupiah (2016); 1.999,26 ribu rupiah (2017); 2.217,18 ribu rupiah (2018); 2.400,02 ribu rupiah (2019) dan turun menjadi 2.377,77 ribu rupiah pada tahun 2020.

Rata-rata konsumsi pemerintah per-kapita atas dasar harga konstan 2010 juga menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya, dengan masing-masing senilai 1.378,52 ribu rupiah (2015); 1.265,84 ribu rupiah (2016); 1.303,67 ribu rupiah (2017); 1.367,52 ribu rupiah (2018); 1.427,54 ribu rupiah (2019) dan 1.376,91 ribu rupiah (2020). Hal ini menunjukkan adanya peningkatan pengeluaran konsumsi pemerintah secara kuantitas, dengan laju pertumbuhan sebesar 1,15 persen (2015) dan menjadi minus 7,85 persen (2016). Kemudian pada tahun berikutnya pertumbuhan konsumsi pemerintah per kapita yaitu 3,33 persen (2017); 5,21 persen (2018); 4,66 persen (2019) dan minus 3,33 persen (2020).

Rata-rata konsumsi per pegawai pemerintah menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Pada tahun 2015 konsumsi pemerintah per-pegawai pemerintah sebesar 104.012,14 ribu rupiah, kemudian pada tahun-tahun berikutnya masing-masing 102.936,49 ribu rupiah (2016); dan 112.137,11 ribu rupiah (2017); 126.018,05 ribu rupiah (2018); 137.853,66 ribu rupiah (2019) dan 137.925,54 ribu rupiah (2020).

Pada tingkat harga konstan 2010 indikator pemerataan menurut pegawai ini juga menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Persentase kenaikan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2018 dan 2019, masing-masing sebesar 6,30 persen dan 5,49 persen.

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan (baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010), tidak sejalan dengan jumlah pegawai pemerintah

yang mengalami penurunan. Pada periode tahun 2015 s.d 2020 jumlah pegawai pemerintah terus mengalami penurunan dengan jumlah pada masing-masing tahun sebesar 19,069 orang (2015); 18,908 orang (2016); 18,699 orang (2017); 18,507 orang (2018); 18,361 orang (2019) dan 18,222 orang (2020).

Gambaran tentang konsumsi akhir pemerintah secara “riil” ini menunjukkan peningkatan baik secara keseluruhan maupun rata-rata (per penduduk maupun per pegawai pemerintah). Parameter ini adalah pendekatan untuk mengukur pemerataan kesempatan masyarakat atas pengeluaran sumber daya finansial oleh pemerintah. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2018 dan 2019, dengan rincian untuk total konsumsi pemerintah masing-masing tahun sebesar 5,21 persen dan 4,66 persen; untuk konsumsi per-kapitanya 4,90 persen dan 4,39 persen; sedangkan untuk konsumsi per-pegawai pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2018 dan 2019 yaitu 6,30 persen dan 5,49 persen.

3.2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital)⁹. Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Pengelompokan PMTB pada PDRB tahun dasar 2010 dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu Bangunan dan Non Bangunan. Data di bawah ini menjelaskan bahwa, secara keseluruhan proporsi PMTB dalam kurun waktu 2015-2020 meningkat dari 27,59 persen(2015) menjadi 28,70 persen (2020), sementara di tahun lainnya masing-masing 28,00 persen(2016); 28,51 persen(2017); 29,17 persen(2018) dan 29,58 persen(2019). Pertumbuhan PMTB tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 8,08 persen.

⁹ Selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun diekspor

**Tabel 12. Perkembangan dan Struktur PMTB
Kabupaten Nganjuk**
*Table 12. Trend and Structure of GFCE, Region Nganjuk
2015 - 2020¹*

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Total PMTB						
a. ADHB (<i>Juta Rp</i>)	5.275.072,42	5.912.253,32	6.499.983,88	7.228.998,88	7.883.633,65	7.634.199,28
b. ADHK 2010 (<i>Juta Rp</i>)	4.070.748,72	4.321.916,00	4.586.283,98	4.956.721,93	5.259.592,51	5.026.389,50
Proporsi terhadap PDRB						
(% - ADHB)	27,59	28,00	28,51	29,17	29,58	28,70
<u>Struktur PMTB [1]</u>						
a. Bangunan (<i>Juta Rp</i>)	4.132.916,15	4.696.740,59	5.168.414,91	5.780.205,47	6.332.585,18	6.110.557,49
(%)	(78,35)	(79,44)	(79,51)	(79,96)	(80,30)	(80,04)
b. Non Bangunan (<i>Juta Rp</i>)	1.142.156,27	1.215.512,72	1.331.568,97	1.448.793,41	1.551.048,47	1.523.641,78
(%)	(21,65)	(20,56)	(20,49)	(20,04)	(19,70)	(19,96)
Total PMTB (<i>Juta Rp</i>)						
(%)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)
<u>Pertumbuhan[2] (%)</u>						
a. Bangunan	5,47	6,63	6,35	8,59	6,31	-4,40
b. Non Bangunan	4,63	4,60	5,31	6,24	5,38	-4,54
Total PMTB	5,28	6,17	6,12	8,08	6,11	-4,43

¹ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga berlaku /ADHB)

¹ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK 2010)

3.2.5. Perubahan Inventori

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk “**persediaan**” berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

**Tabel 13. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori
Kabupaten Nganjuk**
*Table 13. Trend and Structure of Changes in Inventories, Region Nganjuk
2015 – 2020*

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Total Nilai Inventori						
a. ADHB (<i>Juta Rp</i>)	663.724,24	572.843,37	586.946,77	652.000,58	668.518,21	276.244,99
b. ADHK 2010 (<i>Juta Rp</i>)	458.796,20	381.426,10	389.172,68	394.371,50	397.731,32	161.406,34
Proporsi terhadap PDRB						
(% - ADHB)	3,47	2,71	2,57	2,63	2,51	1,04

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih jauh sebagaimana dilakukan pada komponen pengeluaran lainnya.

Pada tahun 2015 perubahan inventori atas dasar harga berlaku sebesar 663.724,24 juta rupiah dan 2016 turun menjadi sebesar 572.843,37 juta rupiah. Pada tahun 2017 perubahan inventori mencapai 586.946,77 juta rupiah, tahun 2018 naik menjadi mencapai 652.000,58 juta rupiah; 668.518,21 juta rupiah di tahun 2019 dan pada tahun 2020 turun menjadi sebesar 276.244,99 juta rupiah.

Sementara itu, proporsi perubahan inventori terhadap total PDRB di Kabupaten Nganjuk mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015, proporsi perubahan inventori adalah 3,47 persen, selanjutnya 2,71 persen (2016), 2,57 persen (2017), 2,63 persen (2018), 2,51 persen (2019), dan 1,04 persen (2020). Proporsi perubahan inventori tertinggi terdapat pada tahun 2015 sebesar 3,47 persen.

3.2.6. Ekspor Barang dan Jasa

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi Kabupaten Nganjuk, tetapi dikonsumsi oleh pihak yang berdomisili di wilayah lain, baik itu kabupaten lain di dalam satu propinsi, propinsi lain, maupun luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya.

Tabel 14. Perkembangan Ekspor Kabupaten Nganjuk
Table 14. Trend of Export, Region Nganjuk
2015 – 2020

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Total Nilai Ekspor						
. ADHB (<i>Juta Rp</i>)	7.695.980,22	8.925.459,71	10.345.718,21	11.682.358,41	12.166.942,22	12.211.995,90
. ADHK 2010 (<i>Juta Rp</i>)	5.802.289,26	6.512.412,16	7.190.996,52	7.783.921,99	8.093.486,74	8.016.813,82
Proporsi terhadap PDRB						
(% - ADHB)	40,25	42,27	45,38	47,14	45,65	45,91
Pertumbuhan Ekspor Barang Dan Jasa (%-ADHK)	18,24	12,24	10,42	8,25	3,98	-0,95

Secara total, dalam kurun waktu 2015-2020 nilai ekspor barang dan jasa menunjukkan peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2015 nilai ekspor barang dan jasa sebesar 7.695.980,22 juta rupiah meningkat menjadi sebesar 8.925.459,71 juta rupiah pada tahun 2016. Selanjutnya pada tahun 2017-2020 nilai ekspor barang dan jasa sebesar 10.345.718,21 juta rupiah, 11.682.358,41 juta rupiah, 12.166.942,22 juta rupiah dan 12.211.995,90 juta rupiah. Sejalan dengan nilai ekspor atas dasar harga Berlaku, nilai ekspor barang dan jasa atas dasar harga konstan 2010 juga menunjukkan arah pertumbuhan yang sama, yaitu cenderung meningkat dengan nilai “riil” masing-masing tahun sebesar 5.802.289,26 juta rupiah (2015); 6.512.412,16 juta rupiah (2016); 7.190.996,52 juta rupiah (2017); 7.783.921,99 juta rupiah (2018); 8.093.486,74 juta rupiah (2019) dan 8.016.813,82 juta rupiah (2020). Sementara itu, pada periode 2015 s.d 2020, proporsi dalam PDRB justru cenderung meningkat dari 40,25 persen pada tahun 2015 menjadi 45,91 persen di tahun 2020.

Pertumbuhan riil total ekspor mencapai angka yang tinggi, khususnya pada tahun 2015 dan 2016, dengan masing-masing tahun mencapai 18,24 persen dan 12,24 persen. Pertumbuhan yang tinggi tersebut disebabkan adanya melimpahnya produksi bawang merah. Sementara itu, pada tahun lainnya, pertumbuhan ekspor pada masing-masing tahun adalah sebesar 10,42 persen (2017); 8,25 persen (2018); 3,98 persen (2019) dan minus 0,95 persen (2020).

3.2.7. Impor Barang dan Jasa

Aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPR, dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori) dan ekspor, didalamnya terkandung produk yang berasal dari impor. PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi domestik Kabupaten Nganjuk. Sehingga untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, maka komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungannya itu dengan cara mengurangkan nilai PDRB (E) dengan nilai

impornya. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha (sektor).

Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan ada tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen. Impor terdiri dari produk barang maupun jasa, meskipun rincian penggolongan-nya bisa berbeda dengan ekspor. Komponen impor termasuk pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung (*direct purchase*) oleh penduduk (*resident*) Kabupaten Nganjuk di luar domestik, baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa). Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor barang dan jasa dapat menunjukkan seberapa besar ketergantungan Kabupaten Nganjuk terhadap ekonomi atau produk wilayah lain, baik wilayah kabupaten/kota lain dalam satu propinsi, propinsi lain, maupun luar negeri.

Data pada tabel di bawah ini menunjukkan bahwa secara total nilai impor barang dan jasa Kabupaten Nganjuk meningkat (baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010) pada kurun tahun 2015 s.d 2020. Pada tahun 2015 nilai impor barang dan jasa atas dasar harga berlaku mencapai 10.570.069,50 juta rupiah, kemudian meningkat di tahun 2016 menjadi 11.549.095,09 juta rupiah. Pada tahun 2017 menjadi 13.101.685,01 juta rupiah; menjadi 14.906.484,68 di tahun 2018; menjadi 15.765.062,38 di tahun 2019 dan menjadi 15.107.869,77 juta rupiah pada tahun 2020. Demikian juga dengan proporsinya, pada tahun 2015 impor barang dan jasa memberikan kontribusi sebesar 55,28 persen. Pada tahun berikutnya kontribusi impor barang dan jasa turun menjadi 54,70 persen dan 57,47 persen pada tahun 2016 dan tahun 2017. Selanjutnya, pada tahun 2018-2020 proporsi impor barang dan jasa sebesar 60,15 persen, 59,15 persen dan 56,79 persen.

Tabel 15. Perkembangan Impor Kabupaten Nganjuk 2015 – 2020
Table 15. Trend of Import, Region Nganjuk
2015 – 2020

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Total Nilai Impor						
. ADHB (Juta Rp)	10.570.069,50	11.549.095,09	13.101.685,01	14.906.484,68	15.765.062,38	15.107.869,77
. ADHK 2010 (Juta Rp)	8.213.975,10	8.701.939,39	9.376.470,38	10.125.341,58	10.518.481,90	10.007.299,87
Proporsi terhadap PDRB						
(% - ADHB)	55,28	54,70	57,47	60,15	59,15	57,79
Pertumbuhan Impor Barang Dan Jasa (%-ADHK)	7,98	5,94	7,75	7,99	3,88	-4,86

Demikian pula dengan pertumbuhannya, secara riil nilai impor mengalami fluktuasi, pada tahun 2015 sebesar 7,98 persen. Pada tahun 2016 pertumbuhan impor cenderung turun dan mencapai 5,94 persen, dan pada tahun 2017 tumbuh sebesar 7,75 persen. Pada tahun 2018 pertumbuhan impor meningkat menjadi 7,99 persen; melambat menjadi 3,88 persen di tahun 2019 dan melambat lagi menjadi minus 4,86 persen di tahun 2020. Seperti halnya dengan komposisi ekspor, komposisi impor sebagian besar produk impor berbentuk barang yang mencapai diatas 90 persen.

<https://nganjukkab.bps.go.id>

PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB KABUPATEN NGANJUK MENURUT PENGELUARAN TAHUN 2016-2020

4

PDRB Nganjuk

2020



ADHB

26,601 Juta

ADHK

17,990 Juta

Proporsi Total Pengeluaran
Konsumsi Akhir Terhadap PDRB 2020



18,67 T

**Konsumsi
Rumah Tangga**



2,51 T

**Konsumsi
Pemerintah**



404 M

**Konsumsi
LNPRT**

Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PRDB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

4.1 PDRB (NOMINAL)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam wilayah ekonomi Kabupaten Nganjuk di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga, dan tenaga kerja). Untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, dapat dilihat dari data PDRB perkapita

Tabel 16. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Nganjuk
Table 16. Gross Domestic Regional Bruto and per capita GRDP, Region Nganjuk 2015 – 2020

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nilai PDRB (<i>Juta Rp</i>)						
- ADHB	19.122.237,83	21.113.913,82	22.799.234,53	24.782.292,72	26.651.116,15	26.601.161,82
- ADHK 2010	14.875.350,75	15.661.813,91	16.485.623,70	17.373.257,60	18.304.204,58	17.990.364,53
PDRB perkapita (<i>Rp</i>)						
- ADHB	18.356,479	20.197,454	21.738,421	23.559,552	25.271,039	25.166,400
- ADHK 2010	14.279,660	14.982,005	15.718,573	16.516,073	17.356,357	17.020,035
Pertumbuhan						
PDRB perkapita ADHK 2010	4,78	4,92	4,92	5,07	5,09	-1,94
Jumlah penduduk (<i>jiwa</i>)	1.041.716	1.045.375	1.048.799	1.051.900	1.054.611	1.057.011
Pertumbuhan	0,38	0,35	0,33	0,30	0,26	0,23

Tabel 16 menunjukkan peningkatan PDRB perkapita Kabupaten Nganjuk dari tahun ke tahun yang seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Kabupaten Nganjuk rata-rata mampu menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar nilai perkapita di masing-masing tahun tersebut.

Sementara itu pertumbuhan perkapita secara “riil” juga selalu meningkat di kisaran 5 persen. Pertumbuhan ekonomi tersebut diikuti pula oleh penambahan jumlah penduduk, yang meningkat

rata-rata pada kisaran 0,23 – 0,40 persen setiap tahunnya. Dengan demikian maka pertumbuhan perkapita tersebut tidak saja terjadi secara “riil” tetapi juga terjadi secara kualitas.

4.2 PROPORSI PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

Tabel 17. Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Nganjuk
Table 17. Total Proporsion of Final Consumption Expenditure to GRDP Region Nganjuk 2015 – 2020

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Konsumsi Akhir (ADHB) (Juta Rp)						
a. Rumah tangga	13.787.596,87	14.993.523,64	16.042.072,36	17.430.134,27	18.771.710,10	18.668.917,95
b. LNPRT	286.526,16	312.641,28	329.372,92	363.030,40	394.287,44	404.346,43
c. Pemerintah	1.983.407,41	1.946.287,59	2.096.825,39	2.332.254,86	2.531.086,92	2.513.327,04
Jumlah	16.057.530,44	17.252.452,51	18.468.270,68	20.125.419,52	21.697.084,45	21.586.591,42
PDRB (ADHB) (Juta Rp)	19.122.237,83	21.113.913,82	22.799.234,53	24.782.292,72	26.651.116,15	26.601.161,82
Proporsi	83,97	81,71	81,00	81,21	81,41	81,15

Sebagian besar barang dan jasa yang berada di wilayah domestik digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir. Meskipun konsumsi akhir makin meningkat setiap tahunnya, namun proporsinya terhadap PDRB ada kecenderungan berfluktuatif pada kisaran 80 sampai 90 persen. Dalam hal ini, produk yang tidak digunakan menjadi konsumsi akhir (PMTB atau ekspor) memiliki peran yang relatif kecil.

4.2.1 PERBANDINGAN PENGELUARAN PDRB UNTUK KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP EKSPOR

Indikator ini menunjukkan perbandingan antara produk yang dikonsumsi rumah tangga di wilayah domestik dengan produk yang diekspor. Selama ini konsumsi rumah tangga mempunyai kontribusi yang sangat dominan dalam penggunaan PDRB Kabupaten Nganjuk berkisar 70 -76 persen, yang artinya bahwa seluruh produk yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Nganjuk sebagian besar digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga. Namun di dalamnya termasuk pula sebagian produk yang berasal dari impor.

Tabel 18. Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor, 2015- 2020

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Total Konsumsi Rumah Tangga (ADHB)(Juta Rp)	13.787.596,87	14.993.523,64	16.042.072,36	17.430.134,27	18.771.710,10	18.668.917,95
Total Ekspor (ADHB) (Juta Rp)	7.695.980,22	8.925.459,71	10.345.718,21	11.682.358,41	12.166.942,22	12.211.995,90
Perbandingan Konsumsi Rumah Tanggathd Ekspor	1,79	1,68	1,55	1,49	1,54	1,53

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2015, produk yang digunakan untuk konsumsi rumah tangga sebanyak 1,79 kali dari yang diekspor. Ini berarti bahwa sebagian besar penyediaan (*supply*) domestik diserap untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir rumah tangga. Selama periode 2015-2020, rasio perbandingan konsumsi rumah tangga terhadap ekspor menunjukkan kecenderungan terus menurun. Secara implisit data 2015-2020 menjelaskan bahwa nilai konsumsi akhir rumah tangga terhadap ekspor semakin menurun .

4.2.2 PERBANDINGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

Rasio ini merupakan perbandingan antara produk yang digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga dengan yang digunakan untuk investasi fisik (pembentukan modal tetap). Sekilas nampak bahwa sebagian besar penggunaan produk yang tersedia di wilayah domestik Kabupaten Nganjuk digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga.

**Tabel 19. Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB
Tahun 2015 – 2020**

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Total Konsumsi Rumah Tangga (ADHB)(Juta Rp)	13.787.596,87	14.993.523,64	16.042.072,36	17.430.134,27	18.771.710,10	18.668.917,95
Total PMTB (ADHB)(Juta Rp)	5.275.072,42	5.912.253,32	6.499.983,88	7.228.998,88	7.883.633,65	7.634.199,28
Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB	2,61	2,54	2,47	2,41	2,38	2,45

Seperti halnya terhadap ekspor, rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB cenderung sejalan, dari sebesar 2,61 pada tahun 2015 menjadi 2,54 pada tahun 2016. Pada tahun-tahun berikutnya rasionya berfluktuasi menjadi; 2,47 (2017); 2,41(2018); 2,38(2019); dan kemudian naik menjadi 2,45 (2020). Hal ini terjadi karena nilai investasi cenderung melambat, sementara konsumsi akhir rumah tangga mengalami percepatan.

4.2.3 PERBANDINGAN EKSPOR TERHADAP PMTB

Ekspor merupakan produk yang tidak dikonsumsi di wilayah domestik, tetapi diperdagangkan ke luar wilayah. Untuk menghasilkan produk yang diekspor kemungkinan besar menggunakan modal (PMTB). Sementara di sisi lain sebagian barang yang diekspor bisa pula berupa barang modal. Rasio ekspor terhadap PMTB dimaksudkan untuk menunjukkan perbandingan antara nilai produk ekspor dengan nilai produk yang menjadi modal (PMTB).

Tabel 20. Rasio Ekspor terhadap PMTB (ADHB) Tahun 2015 – 2020

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Ekspor (ADHB)(Juta Rp)	7.695.980,22	8.925.459,71	10.345.718,21	11.682.358,41	12.166.942,22	12.211.995,90
Total PMTB (ADHB)(Juta Rp)	5.275.072,42	5.912.253,32	6.499.983,88	7.228.998,88	7.883.633,65	7.634.199,28
Rasio Ekspor terhadap PMTB	1,46	1,51	1,59	1,62	1,54	1,60

Selama tahun 2015-2020, ekspor mempunyai nilai yang lebih tinggi dari PMTB dan rasio ekspor terhadap PMTB juga mempunyai kecenderungan meningkat dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Untuk menghasilkan seluruh produk domestik (termasuk ekspor) disyaratkan tersedianya sejumlah kapital (yang di dalamnya termasuk pula kapital impor). Peningkatan rasio ini diantaranya disebabkan oleh kenaikan ekspor yang relatif lebih pesat dibandingkan dengan kenaikan PMTB.

4.2.4 PERBANDINGAN PDRB TERHADAP IMPOR

Rasio ini memberikan gambaran tentang perbandingan antara produk yang dihasilkan di wilayah ekonomi domestik (PDRB) dengan produk yang berasal dari impor. Selain itu data tersebut menjelaskan tentang ketergantungan PDRB terhadap produk yang dihasilkan dari luar wilayah. Jika rasionya kecil berarti ketergantungan akan impor semakin tinggi, dan sebaliknya.

Tabel 21. Rasio PDRB terhadap Impor Kabupaten Nganjuk Tahun 2015 – 2020

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
PDRB (ADHB) (Juta Rp)	19.122.237,83	21.113.913,82	22.799.234,53	24.782.292,72	26.651.116,15	26.601.161,82
Total Impor (ADHB) (Juta Rp)	10.570.069,50	11.549.095,09	13.101.685,01	14.906.484,68	15.765.062,38	15.107.869,77
Rasio PDRB terhadap Impor	1,81	1,83	1,74	1,66	1,69	1,76

Tabel 21 menunjukkan rasio PDRB terhadap impor selama tahun 2015 - 2020 cenderung menurun. Rasio PDRB terhadap impor tahun 2015 sebesar 1,81 berfluktuatif menjadi 1,83 (2016); 1,74 (2017); 1,66 (2018); 1,69 (2019); dan 1,76 (2020). Peningkatan rasio menunjukkan ketergantungan PDRB terhadap produk impor yang semakin menurun.

4.2.5 KESEIMBANGAN TOTAL PENYEDIAAN DAN TOTAL PERMINTAAN

Rasio ini dapat menunjukkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi suatu daerah oleh produk yang berasal dari impor. Ketergantungan (ketidakseimbangan) tersebut dapat dilihat melalui keseimbangan antara total penyediaan (*supply*) dengan total permintaan akhir (*demand*).

Dari tabel di bawah ini, dapat dilihat bahwa untuk memenuhi permintaan akhir domestik, sebagian produk masih harus didatangkan dari luar negeri dan luar daerah, dengan rentang 35 s.d 38 persen. Dengan kata lain, kebutuhan masyarakat baru bisa dipenuhi sampai 65 persen dari selisih hasil produksi domestik. Dalam kurun waktu tersebut, tendensi permintaan (akhir) masyarakat terus

meningkat setiap tahunnya, dari 29,692,307.32 juta (2015) menjadi sebesar 41,709,031.59 juta rupiah (2020).

Tabel 22. Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan Kabupaten Nganjuk, Tahun 2015 – 2020

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Total Penyediaan						
PDRB (ADHB)						
(Juta Rp)	19.122.237,83	21.113.913,82	22.799.234,53	24.782.292,72	26.651.116,15	26.601.161,82
%	(64.40)	(64.64)	(63.51)	(62.44)	(62.83)	(63.78)
Total nilai Impor ADHB						
(Juta Rp)	10.570.069,50	11.549.095,09	13.101.685,01	14.906.484,68	15.765.062,38	15.107.869,77
%	(35.60)	(35.36)	(36.49)	(37.56)	(37.17)	(36.22)
Total Permintaan						
Akhir¹(Juta Rp)	29.692.307,32	32.663.008,91	35.900.919,55	39.688.777,40	42.416.178,53	41.709.031,59
%	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)

¹ Termasuk diskrepansi statistik

Di sisi lain “penyediaan” produk barang dan jasa yang mampu dihasilkan oleh ekonomi domestik masing-masing sebesar 19.122.237,83 juta rupiah (2015); 21.113.913,82 juta rupiah (2016); 22.799.234.53 juta rupiah (2017); 24.782.292.72 juta rupiah (2018); 26.651.116.15 juta rupiah (2019) dan 26.601.161.82 juta rupiah (2020). Karena produk domestik tidak mampu mencukupi seluruh kebutuhan permintaan, maka berbagai produk barang dan jasa harus diimpor, dengan nilai masing-masing tahun sebesar 10.570.069,50 juta rupiah (2015); 11.549.095,09 juta rupiah (2016); 13.101.685.01 juta rupiah (2017); 14.906.484.68 juta rupiah (2018); 15.765.062.38 juta rupiah (2019) dan 15.107.869.77 juta rupiah (2020).

4.2.6 NERACA PERDAGANGAN (TRADE BALANCE)

Transaksi devisa yang berasal dari perdagangan barang dan jasa dengan pihak luar negeri (non-residen) dapat dilihat melalui neraca perdagangan. Secara konsep, selisih antara nilai ekspor dan nilai impor disebut sebagai “Ekspor Neto”, apabila nilai ekspor lebih besar dari nilai impor, maka terjadi surplus, dan sebaliknya yang terjadi adalah defisit. Dilihat dari arus uang yang masuk atau keluar, apabila tingkat keseimbangan dalam posisi surplus, maka terjadi aliran devisa masuk, sebaliknya kalau posisinya defisit maka terjadi aliran devisa keluar. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa kekuatan ekonomi suatu wilayah di antaranya ditentukan oleh proses tersebut.

Selain gambaran posisi neraca perdagangan, dapat juga dilihat perbandingan (rasio) antara nilai ekspor terhadap impor, meskipun hanya berlaku secara total. Namun rasio tersebut tidak dapat merefleksikan perbandingan menurut jenis komoditas, harga maupun kuantum. Apabila rasio lebih

besar dari 1 (satu) maka nilai ekspor lebih tinggi daripada nilai impor, sebaliknya apabila rasio kurang dari 1 (satu) berarti nilai impor lebih tinggi dari pada nilai ekspor. Besar kecilnya ekspor atau impor suatu wilayah sangat tergantung kepada kondisi ekonomi serta kebutuhan masyarakatnya.

**Tabel 23. Neraca Perdagangan Barang dan Jasa,
Kabupaten Nganjuk Tahun 2015 – 2020**

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nilai Ekspor (ADHB) (Juta Rp)	7.695.980,22	8.925.459,71	10.345.718,21	11.682.358,41	12.166.942,22	12.211.995,90
Nilai Impor (ADHB)(Juta Rp)	10.570.069,50	11.549.095,09	13.101.685,01	14.906.484,68	15.765.062,38	15.107.869,77
Net ekspor (X - M) (Juta Rp)	-2.874.089,27	-2.623.635,38	-2.755.966,80	-3.224.126,27	-3.598.120,16	-2.895.873,87
Rasio ekspor thdp Impor	0,73	0,77	0,79	0,78	0,77	0,81

Selama periode 2015 - 2020, posisi perdagangan barang dan jasa Kabupaten Nganjuk dengan antar daerah dan luar negeri, selalu menunjukkan nilai negatif. Hal ini menunjukkan neraca perdagangan barang dan jasa Kabupaten Nganjuk berada dalam posisi defisit. Nilai ekspor yang lebih kecil dari impor menyebabkan adanya aliran devisa keluar, yang dalam konteks lain disebut sebagai **"hutang luar negeri"**. Pada tahun 2015 posisi perdagangan barang dan jasa mengalami defisit dimana nilai impor lebih besar daripada ekspor, sehingga net ekspornya mencapai minus 2.874.089,27 juta rupiah. Sampai dengan tahun 2020, nilai net ekspor telah mencapai minus 2.895.873,87 juta rupiah.

Sementara rasio ekspor terhadap impor cenderung fluktuatif dari tahun 2015-2020. Pada tahun 2015 rasionya sebesar 0,73 kemudian naik menjadi sekitar 0,77 pada tahun 2016, kemudian menjadi 0,79 pada tahun 2017, turun menjadi 0,78 pada tahun 2018, turun menjadi 0,77 pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 rasionya menjadi sebesar 0,81.

4.3 INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO (ICOR)

"ICOR" merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (*output*) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran).

Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter "Nilai Tambah".

Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak "K" unit. Formula:

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

Dimana: I_t = PMTB tahun ke t

Y_t = Output tahun ke t

Y_{t-1} = Output tahun ke t-1

**Tabel 24. Incremental Capital Output Ratio,
Kabupaten Nganjuk
2016 - 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHK 2010) (Juta Rp)	15.661.813,91	16.485.623,70	17.373.257,60	18.304.204,58	17.990.364,53
Perubahan (ADHK)(Juta Rp)	786.463,16	823.809,79	887.633,90	930.946,98	-313.840,06
PMTB (ADHK) (Juta Rp)	4.321.916,00	4.586.283,98	4.956.721,93	5.259.592,51	5.026.389,50
ICOR	5,50	5,57	5,58	5,65	-16,02

Data di atas menunjukkan besaran ICOR cenderung meningkat dari sebesar 5,50 (2016) menjadi 5,57 (2017); 5,58 (2018); 5,65 (2019) dan menjadi minus 16,02 (2020). Pada tahun 2019, ICOR meningkat menjadi 5,65 yang artinya untuk menghasilkan 1 unit output dibutuhkan penambahan kapital sebanyak 5,65 unit.

BAB 5
PENUTUP

<https://inganjukkab.bps.go.id>

1. PDRB menurut pengeluaran tahun 2015 s.d 2020 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kabupaten Nganjuk pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan luar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
2. Data dapat disajikan dalam bentuk series data dari tahun 2015 s.d 2020, sehingga mudah di dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antar waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dsb) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
3. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri dan perdagangan antar daerah yang dimaksud. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti penduduk, rumah tangga, dan pegawai negeri), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
4. Sebagian data tentang interaksi dengan luar daerah (*external account*) secara agregat disajikan disini, seperti ekspor dan impor. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Kabupaten Nganjuk terhadap ekonomi luar daerah.
5. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan bahkan Neraca Arus Dana (NAD).

<https://inganjukkab.bps.go.id>

BAB 6
LAMPIRAN

**Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Nganjuk Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Pengeluaran 2015 - 2020 (juta rupiah)**

No	Komponen Penggunaan	2015	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	13.787.596,87	14.993.523,64	16.042.072,36	17.430.134,27	18.771.710,10	18.668.917,95
	a. Makanan dan Minuman Non Beralkohol	3.797.029,39	4.079.936,09	4.287.754,63	4.632.656,95	4.950.365,89	5.278.539,22
	b. Minuman Beralkohol dan Rokok	424.777,99	465.830,03	488.008,95	518.337,42	553.174,62	572.172,58
	c. Pakaian	429.728,26	460.979,43	503.282,06	547.187,79	576.820,93	572.711,47
	d. Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya	580.741,69	628.763,12	675.551,58	720.224,41	759.298,21	809.170,66
	e. Perabot, Peralatan rumahtangga dan Pemeliharaan Rutin Rumah	571.132,86	618.891,22	654.659,67	703.935,54	746.275,34	767.634,58
	f. Kesehatan	528.314,72	572.133,39	612.137,64	656.952,95	696.016,95	781.821,53
	g. Transportasi/ Angkutan	2.350.134,52	2.544.256,97	2.757.699,48	3.070.851,99	3.399.306,39	2.607.776,36
	h. Komunikasi	430.119,32	480.612,23	522.872,34	567.433,35	607.687,09	673.308,69
	i. Rekreasi dan Budaya	899.263,63	981.303,53	1.064.399,58	1.141.207,80	1.224.911,99	1.101.391,54
	j. Pendidikan	420.799,11	461.364,46	508.313,39	552.704,99	588.395,97	620.195,67
	k. Penginapan dan Hotel	2.655.144,92	2.928.857,17	3.139.641,97	3.420.105,58	3.710.297,75	3.831.645,34
	l. Barang Pribadi dan Jasa Perorangan	700.410,47	770.596,00	827.751,06	898.535,49	959.158,97	1.052.550,29
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	286.526,16	312.641,28	329.372,92	363.030,40	394.287,44	404.346,43
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.983.407,41	1.946.287,59	2.096.825,39	2.332.254,86	2.531.086,92	2.513.327,04
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	5.275.072,42	5.912.253,32	6.499.983,88	7.228.998,88	7.883.633,65	7.634.199,28
	a. Bangunan	4.132.916,15	4.696.740,59	5.168.414,91	5.780.205,47	6.332.585,18	6.110.557,49
	b. Non-Bangunan	1.142.156,27	1.215.512,72	1.331.568,97	1.448.793,41	1.551.048,47	1.523.641,78
5	Perubahan Inventori	663.724,24	572.843,37	586.946,77	652.000,58	668.518,21	276.244,99
6	Ekspor	7.695.980,22	8.925.459,71	10.345.718,21	11.682.358,41	12.166.942,22	12.211.995,90
7	Impor	10.570.069,50	11.549.095,09	13.101.685,01	14.906.484,68	15.765.062,38	15.107.869,77
	PDRB	19.122.237,83	21.113.913,82	22.799.234,53	24.782.292,72	26.651.116,15	26.601.161,82

* Angka sementara

**Angka sangat sementara

**Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Nganjuk Atas Dasar Harga Konstan
2010 Menurut Pengeluaran 2015 - 2020 (juta rupiah)**

No	Komponen Penggunaan	2015	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	11.115.429,82	11.608.297,67	12.107.104,51	12.688.762,15	13.315.737,97	13.086.028,04
	a. Makanan dan Minuman Non Beralkohol	3.039.590,26	3.131.770,65	3.230.130,53	3.373.886,73	3.512.670,36	3.675.780,63
	b. Minuman Beralkohol dan Rokok	343.946,67	346.271,43	351.236,70	361.964,86	376.188,94	382.517,24
	c. Pakaian	351.075,11	362.898,84	378.828,28	392.476,07	407.032,17	397.655,22
	d. Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya	505.884,67	538.165,58	566.415,24	588.979,86	610.309,09	636.752,29
	e. Perabot, Peralatan rumah tangga dan Pemeliharaan Rutin Rumah	477.817,43	497.430,73	515.187,54	534.814,11	555.389,46	564.273,81
	f. Kesehatan	407.606,02	425.706,59	442.184,55	459.901,70	476.802,46	524.056,26
	g. Transportasi/ Angkutan	2.001.169,91	2.110.839,08	2.228.905,21	2.396.832,94	2.573.280,05	2.081.004,30
	h. Komunikasi	363.952,54	394.494,73	420.382,91	440.869,08	460.074,97	497.466,05
	i. Rekreasi dan Budaya	741.244,65	780.273,62	823.099,11	858.966,19	900.989,31	798.196,87
	j. Pendidikan	317.118,64	334.031,12	350.356,27	365.051,24	378.048,98	391.762,70
	k. Penginapan dan Hotel	1.975.547,10	2.068.116,46	2.152.690,66	2.242.761,26	2.365.848,60	2.389.063,22
	l. Barang Pribadi dan Jasa Perorangan	590.476,82	618.298,84	647.687,51	672.258,11	699.103,58	747.499,46
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	206.035,36	216.427,93	221.246,16	236.327,47	250.637,11	251.615,68
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.436.026,49	1.323.273,45	1.367.290,23	1.438.494,14	1.505.500,83	1.455.411,02
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	4.070.748,72	4.321.916,00	4.586.283,98	4.956.721,93	5.259.592,51	5.026.389,50
	a. Bangunan	3.157.628,30	3.366.832,20	3.580.507,97	3.888.184,10	4.133.599,24	3.951.519,05
	b. Non-Bangunan	913.120,42	955.083,79	1.005.776,01	1.068.537,83	1.125.993,26	1.074.870,45
5	Perubahan Inventori	458.796,20	381.426,10	389.172,68	394.371,50	397.731,32	161.406,34
6	Ekspor	5.802.289,26	6.512.412,16	7.190.996,52	7.783.921,99	8.093.486,74	8.016.813,82
7	Impor	8.213.975,10	8.701.939,39	9.376.470,38	10.125.341,58	10.518.481,90	10.007.299,87
	PDRB	14.875.350,75	15.661.813,91	16.485.623,70	17.373.257,60	18.304.204,58	17.990.364,53

* Angka sementara

**Angka sangat sementara

**Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Nganjuk Menurut Pengeluaran 2015 - 2020 (persen)**

No	Komponen Penggunaan	2015	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	72,10	71,01	70,36	70,33	70,43	70,18
	a. Makanan dan Minuman Non Beralkohol	19,86	19,32	18,81	18,69	18,57	19,84
	b. Minuman Beralkohol dan Rokok	2,22	2,21	2,14	2,09	2,08	2,15
	c. Pakaian	2,25	2,18	2,21	2,21	2,16	2,15
	d. Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya	3,04	2,98	2,96	2,91	2,85	3,04
	e. Perabot, Peralatan rumah tangga dan Pemeliharaan Rutin Rumah	2,99	2,93	2,87	2,84	2,80	2,89
	f. Kesehatan	2,76	2,71	2,68	2,65	2,61	2,94
	g. Transportasi/Angkutan	12,29	12,05	12,10	12,39	12,75	9,80
	h. Komunikasi	2,25	2,28	2,29	2,29	2,28	2,53
	i. Rekreasi dan Budaya	4,70	4,65	4,67	4,60	4,60	4,14
	j. Pendidikan	2,20	2,19	2,23	2,23	2,21	2,33
	k. Penginapan dan Hotel	13,89	13,87	13,77	13,80	13,92	14,40
	l. Barang Pribadi dan Jasa Perorangan	3,66	3,65	3,63	3,63	3,60	3,96
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,50	1,48	1,44	1,46	1,48	1,52
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	10,37	9,22	9,20	9,41	9,50	9,45
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	27,59	28,00	28,51	29,17	29,58	28,70
	a. Bangunan	21,61	22,24	22,67	23,32	23,76	22,97
	b. Non-Bangunan	5,97	5,76	5,84	5,85	5,82	5,73
5	Perubahan Inventori	3,47	2,71	2,57	2,63	2,51	1,04
6	Ekspor	40,25	42,27	45,38	47,14	45,65	45,91
7	Impor	55,28	54,70	57,47	60,15	59,15	56,79
	PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka sementara

**Angka sangat sementara

**Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
Kabupaten Nganjuk Menurut Pengeluaran 2015 - 2020 (persen)**

No	Komponen Penggunaan	2015	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3,55	4,43	4,30	4,80	4,94	-1,73
	a. Makanan dan Minuman Non Beralkohol	2,43	3,03	3,14	4,45	4,11	4,8264
	b. Minuman Beralkohol dan Rokok	2,36	0,68	1,43	3,05	3,93	1,68
	c. Pakaian	4,65	3,37	4,39	3,60	3,71	-2,30
	d. Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya	4,76	6,38	5,25	3,98	3,62	4,33
	e. Perabot, Peralatan rumahtangga dan Pemeliharaan Rutin Rumah	4,71	4,10	3,57	3,81	3,85	1,60
	f. Kesehatan	5,09	4,44	3,87	4,01	3,67	9,91
	g. Transportasi/ Angkutan	4,85	5,48	5,59	7,53	7,36	-19,13
	h. Komunikasi	7,46	8,39	6,56	4,87	4,36	8,13
	i. Rekreasi dan Budaya	4,63	5,27	5,49	4,36	4,89	-11,41
	j. Pendidikan	5,05	5,33	4,89	4,19	3,56	3,63
	k. Penginapan dan Hotel	2,55	4,69	4,09	4,18	5,49	0,98
	l. Barang Pribadi dan Jasa Perorangan	1,11	4,71	4,75	3,79	3,99	6,92
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	-4,34	5,04	2,23	6,82	6,06	0,39
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,15	-7,85	3,33	5,21	4,66	-3,33
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	5,28	6,17	6,12	8,08	6,11	-4,43
	a. Bangunan	5,47	6,63	6,35	8,59	6,31	-4,40
	b. Non-Bangunan	4,63	4,60	5,31	6,24	5,38	-4,54
5	Perubahan Inventori	-	-	-	-	-	-
6	Ekspor	18,24	12,24	10,42	8,25	3,98	-0,95
7	Impor	7,98	5,94	7,75	7,99	3,88	-4,86
	PDRB	5,18	5,29	5,26	5,38	5,36	-1,71

* Angka sementara

**Angka sangat sementara

**Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Kabupaten
Nganjuk
Menurut Pengeluaran 2015 - 2020 (persen)**

No	Komponen Penggunaan	2015	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	124,04	129,16	132,50	137,37	140,97	142,66
	a. Makanan dan Minuman Non Beralkohol	124,92	130,28	132,74	137,31	140,93	143,60
	b. Minuman Beralkohol dan Rokok	123,50	134,53	138,94	143,20	147,05	149,58
	c. Pakaian	122,40	127,03	132,85	139,42	141,71	144,02
	d. Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya	114,80	116,83	119,27	122,28	124,41	127,08
	e. Perabot, Peralatan rumahtangga dan Pemeliharaan Rutin Rumah	119,53	124,42	127,07	131,62	134,37	136,04
	f. Kesehatan	129,61	134,40	138,43	142,85	145,98	149,19
	g. Transportasi/Angkutan	117,44	120,53	123,72	128,12	132,10	125,31
	h. Komunikasi	118,18	121,83	124,38	128,71	132,08	135,35
	i. Rekreasi dan Budaya	121,32	125,76	129,32	132,86	135,95	137,98
	j. Pendidikan	132,69	138,12	145,08	151,40	155,64	158,31
	k. Penginapan dan Hotel	134,40	141,62	145,85	152,50	156,83	160,38
	l. Barang Pribadi dan Jasa Perorangan	118,62	124,63	127,80	133,66	137,20	140,81
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	139,07	144,46	148,87	153,61	157,31	160,70
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	138,12	147,08	153,36	162,13	168,12	172,69
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	129,58	136,80	141,73	145,84	149,89	151,88
	a. Bangunan	130,89	139,50	144,35	148,66	153,20	154,64
	b. Non-Bangunan	125,08	127,27	132,39	135,59	137,75	141,75
5	Perubahan Inventori	-	-	-	-	-	-
6	Ekspor	132,64	137,05	143,87	150,08	150,33	152,33
7	Impor	128,68	132,72	139,73	147,22	149,88	150,97
	PDRB	128,55	134,81	138,30	142,65	145,60	147,86

* Angka sementara

**Angka sangat sementara

**Perubahan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100)
Kabupaten Nganjuk Menurut Pengeluaran 2015 - 2020 (persen)**

No	Komponen Penggunaan	2015	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2,87	4,13	2,59	3,67	2,63	1,20
	a. Makanan dan Minuman Non Beralkohol	3,54	4,29	1,89	3,44	2,64	1,90
	b. Minuman Beralkohol dan Rokok	3,75	8,93	3,28	3,07	2,69	1,72
	c. Pakaian	0,89	3,78	4,59	4,94	1,65	1,63
	d. Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya	1,23	1,77	2,08	2,53	1,74	2,14
	e. Perabot, Peralatan rumahtangga dan Pemeliharaan Rutin Rumah	2,18	4,09	2,13	3,58	2,09	1,24
	f. Kesehatan	5,62	3,69	3,01	3,19	2,19	2,20
	g. Transportasi/ Angkutan	1,35	2,64	2,65	3,55	3,11	-5,14
	h. Komunikasi	1,89	3,09	2,09	3,48	2,62	2,47
	i. Rekreasi dan Budaya	2,49	3,66	2,82	2,74	2,33	1,50
	j. Pendidikan	5,96	4,09	5,04	4,36	2,80	1,71
	k. Penginapan dan Hotel	3,43	5,37	2,99	4,56	2,84	2,27
	l. Barang Pribadi dan Jasa Perorangan	2,66	5,07	2,54	4,58	2,65	2,63
2	Pengeluaran Konsumsi LNPR	8,91	3,87	3,06	3,19	2,41	2,15
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	5,26	6,49	4,27	5,72	3,70	2,72
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	3,45	5,57	3,60	2,90	2,78	1,33
	a. Bangunan	3,06	6,58	3,48	2,99	3,05	0,94
	b. Non-Bangunan	4,82	1,75	4,03	2,41	1,60	2,91
5	Perubahan Inventori	-	-	-	-	-	-
6	Ekspor	1,83	3,33	4,97	4,32	0,16	1,33
7	Impor	-1,30	3,14	5,28	5,36	1,81	0,73
	PDRB	5,43	4,87	2,59	3,14	2,07	1,55

* Angka sementara

**Angka sangat sementara

BAB 7
DAFTAR PUSTAKA

<https://inganjukkab.bps.go.id>

DAFTAR PUSTAKA

1. Badan Pusat Statistik, *Tabel Input Output Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
2. _____, *Pendapatan Nasional Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
3. *Statistik Matriks Investasi Pemerintah Pusat*, berbagai seri, Jakarta.
4. _____, *Profil Ekonomi Rumah tangga 1998*, Jakarta 1999.
5. Frenken Jim, *How To Measure Tangible Capital Stocks*, Netherlands, 1992.
6. Host Poul, Madsen, *Macroeconomic Accounts An Overview*, Pamphlet Series, No. 29, Washington DC, 1979.
7. Keuning. J. Steven, *An Estimate of the Fixed Capital Stock By Industry and Types of Capital Goods in Indonesia*, Statistical Analysis Capability Program, Project Working Paper, Series No.4, Jakarta 1988.
8. *Input-Output Table and Analysis*, Studies in Methods, Series F No. 14 Rev 1, New York, 1973.
9. *Handbook of National Accounting for Production*, Sources and Methods, Series F No. 39, New York, 1986.
10. Verbiest Piet, *Investment Matrix*, Hasil Kerjasama Asian Development Bank dengan Badan Pusat Statistik, Jakarta, 1997.
11. Ward, Michael, *The Measurement of Capital : Methodology of Capital Stock Estimates in OECD Countries*, Paris, 1976.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN NGANJUK**

Jl. Dermojoyo 34A, Kabupaten Nganjuk, Telp/Fax : (0358) 321583
Homepage : <http://nganjukkab.bps.go.id>, E-mail : bps3518@bps.go.id

ISBN 978-623-7091-31-8



9 786237 091318